



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008-2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menetapkan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima tahun);
 - b. bahwa visi, misi, kebijakan dan program daerah Periode 2008-2013 perlu dijabarkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), juga sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001, tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008-2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
9. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 - 2013, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk menunjukkan visi dan misi;
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Forum SKPD Provinsi adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Provinsi untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dengan SKPD Provinsi atau gabungan SKPD Provinsi;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
19. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
23. Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas

menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara disusun dengan menggunakan atas asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, daerah untuk dilaksanakan pada periode Tahun 2008-2013.

BAB IV SISTEMATIKA ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, termuat dalam lampiran dan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam Peraturan daerah ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I.	PENDAHULUAN
BAB II.	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III.	VISI DAN MISI
BAB IV.	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V.	ARAH KEBIJAKAN UMUM
BAB VI.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB VII.	AGENDA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
BAB VIII.	AGENDA REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX.	AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI
BAB X.	AGENDA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
BAB XI.	AGENDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BAB XII.	P E N U T U P

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengendalian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah dituangkan kedalam Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah dituangkan kedalam Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan untuk periode berikutnya.

Pasal 7

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan/atau hasil kajian yang lengkap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Sebelum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berpedoman pada Pasal 3, dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan/Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 22 September 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 22 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2008 NOMOR 7



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 7 TAHUN 2008

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2008-2013

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KENDARI, SEPTEMBER 2008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Tenggara lahir dari semangat juang yang tinggi segenap rakyat Sulawesi Tenggara untuk mandiri. Era otonomi daerah dijadikan momentum untuk bangkit dan menggiatkan derap langkah pembangunan daerah guna menggapai kemajuan dan masa depan yang penuh harapan. Dengan kekuatan tripilar yang meliputi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, bahu membahu dan bersinergi dalam segenap upaya pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan dan akan menjadi mesin utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan maka penguatan landasan perekonomian masyarakat serta peningkatan ketahanan ekonomi wilayah akan menjadi sebuah keniscayaan.

Seiring dengan derasnya gema reformasi dewasa ini maka perlu membangun komitmen dan kesadaran dari segenap penyelenggara pemerintahan daerah untuk lebih tanggap dan lebih profesional dalam merespon tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga dapat memberikan solusi yang inovatif, nilai tambah serta hasil-hasil yang lebih memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan dan percepatan pembangunan daerah yang telah dicapai sebelumnya. Langkah-langkah ini dijabarkan ke dalam visi, misi dan arah kebijakan, strategi dan program-program pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk itu maka Gubernur Sulawesi Tenggara masa bakti 2008-2013 menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode waktu Tahun 2008-2013 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 yang mengandung visi, misi, agenda, pendekatan, arah kebijakan, strategi dan program-program pembangunan daerah untuk kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

I.2. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dan alat kontrol bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk :

1. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
2. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing Kabupaten/Kota.

I.3. Landasan Hukum

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

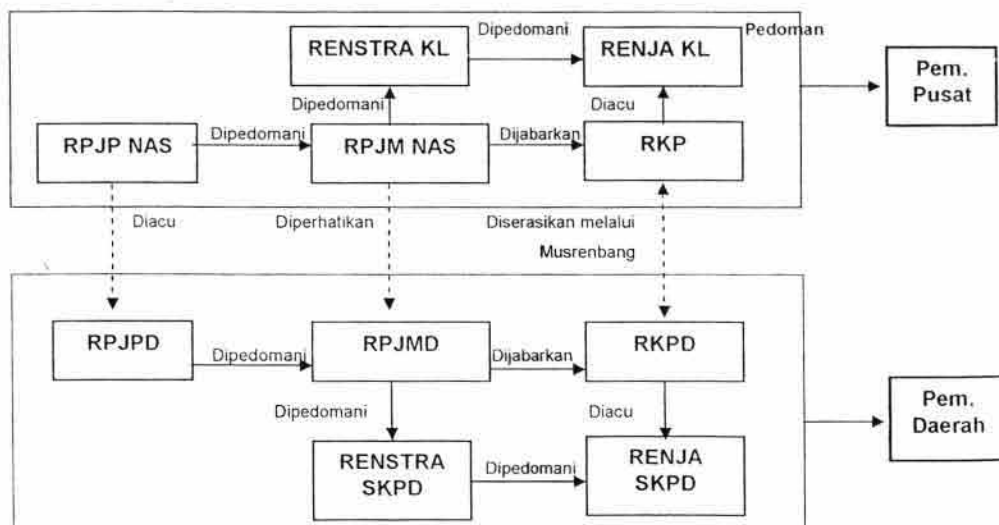
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 11);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3).
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah.

1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 disusun sebagai dokumen rencana strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih. Dokumen ini akan menjadi payung hukum dalam keseluruhan proses dan mekanisme penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah untuk lima tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 sebagai pedoman dan memperhatikan arahan-arahan RPJM Nasional serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019. Secara diagramatis, hubungan antara RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya disajikan melalui gambar berikut :



Gambar 1: Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Secara hirarkis, program-program yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara akan tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta pada Rencana Kerja SKPD. Dengan pola ini, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara akan berfungsi sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III. VISI DAN MISI
- BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V. ARAH KEBIJAKAN UMUM
- BAB VI. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB VII. AGENDA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
 - VII.1. FUNGSI PENDIDIKAN
 - VII.2. FUNGSI KESEHATAN
 - VII.3. FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
- BAB VIII. AGENDA REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH
 - VIII.1. FUNGSI PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN
 - VIII.2. FUNGSI KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
- BAB IX. AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI
 - IX.1. FUNGSI EKONOMI
- BAB X. AGENDA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
 - X.1. FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA
 - A. KEBUDAYAAN
 - B. PARIWISATA
- BAB XI. AGENDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
 - XI.1. FUNGSI EKONOMI
 - XI.2. FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
 - XI.3. FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
- BAB XII. P E N U T U P
 - XII.1. PROGRAM TRANSISI
 - XII.2. KAJIAN PELAKSANAAN

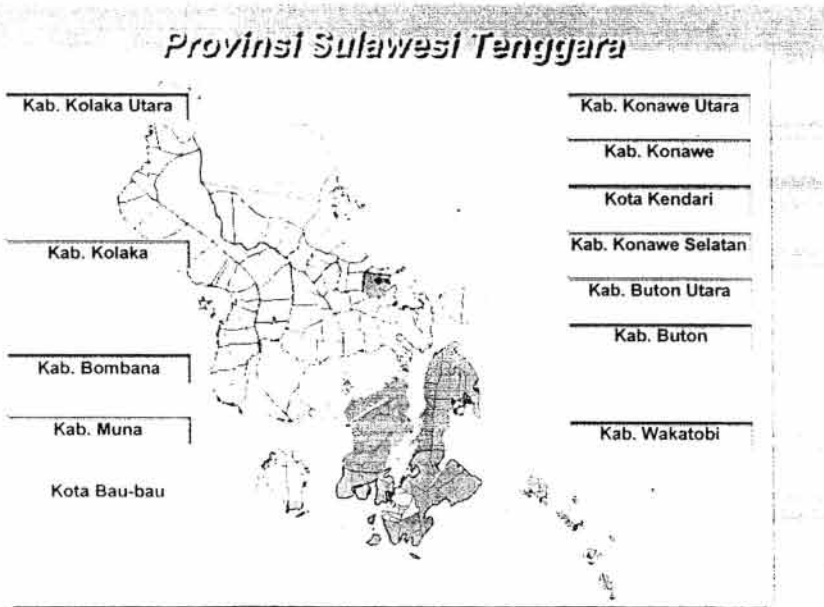
BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

II.1. Letak dan Luas Wilayah

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil dengan total luas 153.019 km², yang meliputi 38.140 km² luas daratan dan 114.879 km² luas lautan, dengan jumlah penduduk 2.117.456 jiwa, terletak pada 3^o - 6^o Lintang Selatan dan 120^o45' - 124^o06' Bujur Timur. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Sebelah Barat : Teluk Bone (Sulawesi Selatan)
- Sebelah Timur : Provinsi Maluku



II.2. Wilayah Administrasi

Hingga Tahun 2007 Provinsi Sulawesi Tenggara telah dimekarkan menjadi 12 daerah otonom yang terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota, dan 176 kecamatan serta 1891 desa dan kelurahan.

Saat ini Kabupaten terluas adalah Kolaka meliputi 17,83% dari total luas wilayah Sulawesi Tenggara, kemudian Kabupaten Konawe 16,93% dan Konawe Selatan 14,89%, secara rinci luas kabupaten kota disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keadaan Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara

No.	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km ²)	Prosentase (%)
1.	Kolaka	6.918,38	17,83
2.	Konawe	6.568,15	16,93
3.	Konawe Selatan	5.779,47	14,89
4.	Konawe Utara	5.101,76	13,15
5.	Kolaka Utara	3.391,02	8,74
6.	Bombana	2.961,08	7,63
7.	Buton	2.648,08	6,82
8.	Muna	2.014,24	5,26
9.	Buton utara	1.959,03	5,05
10.	Wakatobi	822,13	2,12
11.	Kota Kendari	391,57	1,01
12.	Kota Bau-Bau	221,00	0,57
Jumlah		38.140,00	100,00

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2007

II.3. Kondisi Topografi

Secara umum topografi Sulawesi Tenggara bergelombang hingga bergunung. Pada beberapa tempat terdapat dataran aluvial seperti Mowewe, Lainea, Ladongi dan lain-lain. Berdasarkan kelas kemiringan lahan maka kondisi topografi di Sulawesi Tenggara dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Dataran Konawe - Lahumbuti dengan luas kurang lebih 87.500 ha.
2. Dataran Rate-rate – Lambandia dengan luas kurang lebih 25.000 ha.
3. Dataran Waworamo – Punggaluku dengan luas kurang lebih 18.000 ha.
4. Dataran Tinangea – Lakara dengan luas kurang lebih 17.000 ha.

5. Dataran Lalindu – Lasolo dengan luas kurang lebih 17.000 ha.
6. Dataran Konda dengan luas kurang lebih 14.000 ha.
7. Dataran Sampara dengan luas kurang lebih 14.000 ha.
8. Dataran Roraya dengan luas kurang lebih 10.000 ha.
9. Dataran Kolono dengan luas kurang lebih 4.000 ha.
10. Dataran Oko-oko – Tawai dengan luas kurang lebih 13.500 ha.
11. Dataran Kolaka – Pomalaa dengan luas kurang lebih 12.000 ha.
12. Dataran Watuputih dengan luas kurang lebih 7.000 ha.

Tabel 2. Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kelereng Wilayah

Kemiringan Lahan (%)	Luas (Ha)	Prosentase (%)
0 - 2	894.790	23,16
3 - 15	606.657	15,91
15 - 40	1.253.316	32,86
> 40	1.059.237	27,77
Jumlah	3.814.000	100,00

Sumber : Data Base Pembangunan Prov. Sultra 2004

II.4. Kondisi Batuan dan Tanah

Kondisi batuan terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan Sedimen, batuan Metamorfosis dan batuan Beku. Luas masing-masing jenis batuan tersebut adalah Batuan Sedimen seluas 2.579.790 ha, batuan Metamorfosis seluas 754.409 ha dan batuan Beku seluas 479.801 ha.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara pada garis besarnya terdapat 6 (enam) jenis tanah dengan tingkat kesuburan yang berbeda-beda yakni tanah Podzolik seluas 2.299.729 ha atau 60,30 ha persen dari luas tanah di Sulawesi Tenggara, tanah Mediteran seluas 898.802 ha (23,57 %) tanah Latosol seluas 349.784 ha (9,17 %), tanah Alluvial seluas 129.569 ha (3,40%), tanah Organosol seluas 116.099 ha (3,04 %), dan tanah Gromusol seluas 20.017 ha (0,52%).

II.5. Tipe Iklim

Keadaan iklim di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia yaitu beriklim tropis dan memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan di Sulawesi Tenggara terjadi di bulan November dan bulan Maret, khusus pada bulan

April arah angin tidak menentu. Demikian pula dengan curah hujan, kadang-kadang kurang dan kadang-kadang lebat, sehingga pada bulan ini oleh para pelaut disebut sebagai musim pancaroba.

Musim kemarau terjadi di antara bulan Mei dan bulan Oktober karena pada bulan tersebut angin Timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan tidak mengandung uap air, menyebabkan pula kurangnya curah hujan. Walaupun demikian keadaan seringkali menyimpang dari kebiasaan sebab di antara bulan-bulan tersebut kadang-kadang terjadi curah hujan yang tidak merata atau sebaliknya.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa curah hujan di Sulawesi Tenggara pada umumnya selalu tidak merata. Keadaan semacam ini menimbulkan adanya daerah basah dan daerah kering. Pada daerah basah yang meliputi wilayah sebelah utara garis Konawe-Kolaka, kemudian bagian utara Pulau Buton dan Pulau Wawonii mempunyai curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun. Sedangkan daerah kering yang meliputi wilayah sebelah selatan garis Konawe-kolaka dan wilayah kepulauan di sebelah Selatan dan Tenggara jazirah tenggara mempunyai curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun.

Suhu udara atau temperatur pada suatu daerah selalu berbeda, karena dipengaruhi oleh posisi ketinggian dan kerendahan daerah tersebut dari permukaan laut. Makin tinggi posisi suatu tempat dari permukaan laut akan semakin rendah suhu udara yang terjadi. Akan tetapi sebaliknya semakin rendahnya posisi suatu daerah dari permukaan laut maka semakin tinggi suhu udara yang terjadi di daerah tersebut. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada umumnya mempunyai ketinggian di bawah 1.000 m dari permukaan laut adalah beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata minimum 21 derajat Celsius. Sedangkan suhu udara rata-rata maksimum 34 derajat Celsius.

Berdasarkan klasifikasi *Schmidt dan Ferguson* di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 5 (lima) tipe iklim seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi *Schmidt dan Ferguson* di Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Tipe Iklim	Wilayah
1.	B	Sekitar wilayah Kecamatan Asera (Kab. Konawe Utara)
		Sekitar wilayah Kecamatan Lainea (Kab. Konawe Selatan)
		Sekitar wilayah Kecamatan Pakue dan Lasusua (Kab. Kolaka Utara)
		Sekitar wilayah Kecamatan Kabawo (Kab. Muna)
2.	C	Sekitar wilayah Kecamatan Lambuya, Wawotobi dan Sampara (Kab. Konawe)
		Sekitar Kecamatan Lainea, Tinanggea dan Konda (Kab. Konawe Selatan)
		Sekitar wilayah Kecamatan Wolo, Kolaka, Wundulako dan Mowewe (Kab. Kolaka)
		Sekitar Kecamatan Pasar Wajo (Kab. Buton)
		Kecamatan Rarowatu, Kabaena Timur dan Rumbia (Kab. Bombana)

3.	D	Sekitar Kecamatan Wolio (Kota Bau-bau)
		Sekitar Kecamatan Kulisusu (Kab. Buton Utara)
		Sekitar wilayah Kecamatan Pondidaha, Abuki (Kab. Konawe)
		Sekitar wilayah Kecamatan Moramo, Tinanggea, Landono, Angata (Kab. Konawe Selatan)
		Sekitar wilayah Kecamatan Watubangga, Tirawuta dan Ladongi (Kab. Kolaka)
		Sekitar wilayah Kecamatan Batauga, Sampolawa, Kapontori, Lasalimu, Gu (Kab. Buton)
		Sekitar wilayah Kecamatan, Kabaena dan Poleang Timur (Kab. Buton)
		Sekitar wilayah Kecamatan Bungi (Kota Bau-bau)
4.	E	Sekitar Kota Kendari
		Sekitar Kecamatan Tikep dan Lawa (Kab. Muna)
		Sekitar Wilayah Kecamatan Mawasangka (Kab. Buton)
5.	G	Sekitar Wilayah Kecamatan Kaledupa (Kab. Wakatobi)
		Sekitar Kecamatan Tomia (Kab. Wakatobi)

Sumber Data : RTRW Prov. Sultra Tahun 2004

II.6. Hidrologi

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai besar maupun sungai kecil, yang sangat potensial untuk kebutuhan air bersih, irigasi, pembangkit listrik, dan untuk berbagai kebutuhan lainnya. Beberapa Sungai besar seperti Sungai Konaweha di Konawe, sungai Lasolo di Konawe Utara, sungai Tamboli di Kolaka, memiliki debit air hingga 200 m³ per detik

Selain sungai di atas masih banyak sungai-sungai di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain Sungai Lalindu, Sungai Roraya, Sungai Sampolawa, Sungai Wandasa, Sungai Kabangka Balano dan lain-lain. Disamping sungai-sungai tersebut terdapat pula 2 (dua) rawa yang cukup besar yaitu Rawa Aopa yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dan Rawa Tinondo yang terdapat di Kabupaten Kolaka.

II.7. Penggunaan Tanah

Total Penggunaan tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah seluas 3.813.993 ha, yang terbagi ke dalam 8 (delapan) jenis yaitu : tanah sawah seluas 93.113 Ha, bangunan dan halaman sekitarnya seluas 145.914 Ha, tanah tegalan/kebun seluas 214.306, tanah ladang/huma seluas 116.268 Ha, tanah padang rumput 95.094 Ha, tanah rawa yang tidak ditanami 61.757 Ha, tambak, kolam, tebat dan empang seluas 19.161 Ha, lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 314.093 Ha, lahan tanaman kayu-kayuan seluas 306.314 Ha tanah hutan negara seluas 1.753.121 Ha, tanah perkebunan seluas 381.604 Ha dan lainnya 313.25 Ha

II.8. Flora dan Fauna

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan alam berupa Fauna (Binatang) yang khas dan jarang dijumpai di daerah lain di Indonesia. Jenis binatang khas atau spesifik di daerah ini antara lain adalah Anoa, Babi Rusa dan Burung Maleo yang merupakan satwa langka sehingga mendapat perlindungan yang ketat. Binatang lain yang hidup di Sulawesi Tenggara adalah Monyet, Musang, Rusa, Ular, Babi Hutan, Burung Nuri dan Kakatua.

Disamping fauna maka wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara juga mempunyai kekayaan alam Flora (Tumbuh-tumbuhan) berupa hasil hutan. Jenis hasil hutan dimaksud adalah berbagai jenis kayu dan rotan. Jenis kayu jati merupakan salah satu jenis komoditi sumber penghasil devisa daerah dan merupakan produksi andalan Pulau Muna dan daerah Kolono Kabupaten Konawe Selatan, namun kondisinya saat ini cukup memprihatinkan.

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari biosfir, terdiri dari berbagai ekosistem daratan dan lautan yang merupakan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan secara lestari. Untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup maka telah ditetapkan beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

1. Kawasan Suaka Alam yang meliputi :
 - a. Cagar Alam Napabalano
 - b. Cagar Alam Lamedai
 - c. Cagar Alam Kakinauwe
 - d. Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo
 - e. Suaka Margasatwa Buton Utara
 - f. Suaka Margasatwa Tanjung Peropa
 - g. Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo
 - h. Suaka Margasatwa Lambusango.
2. Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi:
 - a. Taman Hutan Raya Murhum
 - b. Taman Hutan Nasional Rawa Aopa Watumohai
 - c. Taman Nasional Laut Wakatobi
 - d. Taman Wisata Alam Mangolo
 - e. Taman Wisata Alam Tirta Rimba Moramo

- f. Taman Wisata Alam Laut P. Padamarang dan sekitarnya
 - g. Taman Wisata Alam Teluk Lasolo
 - h. Taman Buru Mata Osu.
3. Kawasan Rawan Bencana.

Jenis bencana alam yang potensial terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi Gempa Bumi, Banjir Air, Angin Topan, Gelombang Pasang/Tsunami, Tanah Longsor, Kebakaran dan Abrasi. Lokasi yang paling berpotensi terhadap terjadinya bencana alam gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi kawasan Pulau Muna bagian barat dan selatan, Pulau Buton, Kolaka Utara, Konawe Selatan bagian timur, Kota Kendari dan Pulau Wawonii. Sedangkan lokasi yang paling berpotensi terhadap terjadinya bencana alam gelombang pasang/tsunami meliputi kawasan pesisir Pulau Muna bagian barat dan selatan, Pulau Buton bagian selatan dan Kepulauan Wakatobi.

Adapun bencana yang diakibatkan oleh kecelakaan laut sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan semakin tingginya gelombang laut serta semakin meningkatnya intensitas lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu.

II.10 Perekonomian Daerah

Faktor utama yang berperan dalam menciptakan kemajuan ekonomi daerah adalah adanya kejelasan sasaran dan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil, manfaat dan dampaknya bagi peningkatan produktivitas daerah. Inovasi dan terobosan yang didedikasikan untuk melakukan percepatan pembangunan yang didukung oleh instrumen perencanaan yang mengacu pada faktor-faktor potensi daerah dan faktor lingkungan strategis telah berhasil menggerakkan komponen-komponen ekonomi daerah untuk saling bersinergi dalam meningkatkan produktivitas daerah.

Provinsi Sulawesi Tenggara telah berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang bertumpu pada keunggulan daerah yang mampu menciptakan percepatan pembangunan untuk mengejar keteringgalan yang ditandai dengan semakin mantapnya stabilitas makro ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan berbagai indikator sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2002-2007

Indikator Ekonomi	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,66	7,57	7,51	7,31	7,68	7,98
Inflasi (%)	10,03	5,06	6,40	17,11	6,60	7,53
PDRB (ADHB) (Rp.)	8,04 T	8,90 T	10,26 T	12,98 T	15,27 T	17,61 T
PDRB (ADHK) (Rp.)	6,46 T	6,95 T	7,48 T	8,02 T	8,64 T	9,33 T
PDRB/Kapita (ADHB) (Rp.)	4,19 Jt	4,64 Jt	5,34 Jt	6,62 Jt	7,62 Jt	-
PDRB/Kapita (ADHK) (Rp.)	3,37 Jt	3,62 Jt	3,89 Jt	4,09 Jt	4,31 Jt	-

Sumber : BPS Prov. Sultra

Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar 6,66 %. Pada Tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat hingga mencapai 7,57 %. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 7,51 % yang nampak sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar 7,31 % yang ternyata juga lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat menjadi 7,68% dan pada tahun 2007 meningkat lagi hingga mencapai 7,98%.

Adapun perkembangan pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara nampak terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2002 pendapatan perkapita baru sebesar Rp.3,37 Juta dan pada tahun 2004 pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat hingga mencapai Rp.3,89 Juta. Pada tahun 2005 pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat lagi hingga mencapai Rp. 4,09 Juta dan pada Tahun 2006 pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai Rp.4,31 Juta.

Dari sisi peranan sektor-sektor dalam pembentukan PDRB dalam kurun waktu tahun 2002-2006, sektor Pertanian menunjukkan perannya sebagai sektor unggulan yang dominan sebagai

penyumbang PDRB terbesar yaitu rata-rata sekitar 41,34 %. Penyumbang terbesar kedua adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang mencapai rata-rata sekitar 14,56 % sedangkan sektor Jasa-jasa berada pada posisi ketiga dengan kontribusi rata-rata sekitar 13,67 %.

Adapun laju inflasi dalam kurun waktu tahun 2002-2006 nampak berfluktuasi pada tingkat satu hingga dua digit. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yakni sebesar Rp.17,11%. Namun pada tahun 2006 laju inflasi cukup terkendali dan dapat ditekan hingga 6,60%. Keadaan ini berlangsung hingga tahun 2007 dimana laju inflasi hanya sekitar 7,53 %.

II.10. Hukum dan Pemerintahan

Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk pada tanggal 27 April 1964 berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 dengan cakupan wilayah administrasi yang meliputi 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton dan kabupaten Muna.

Dalam perkembangannya, wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2003 menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Seiring dengan eforia pemekaran wilayah maka pada tahun 2007, wilayah administrasi telah menjadi 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, 177 Kecamatan dan 1.911 Desa/Kelurahan sebagaimana ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 5. Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah	
			Kecamatan	Desa/Kel.
1	Konawe	6.568,15	26	344
2	Kolaka	6.918,38	17	176
3	Muna	2.041,24	23	237
4	Buton	2.648,08	21	207
5	Kota Kendari	391,57	10	64
6	Kota Bau Bau	221,00	6	41
7	Konawe Selatan	5.779,47	22	327
8	Kolaka Utara	3.391,13	12	117
9	Bombana	2.961,08	22	139
10	Wakatobi	822,13	8	101
11	Buton Utara	1.959,03	6	59
12	Konawe Utara	5.101,76	7	99
Jumlah		38.140,00	177	1.911

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Sultra

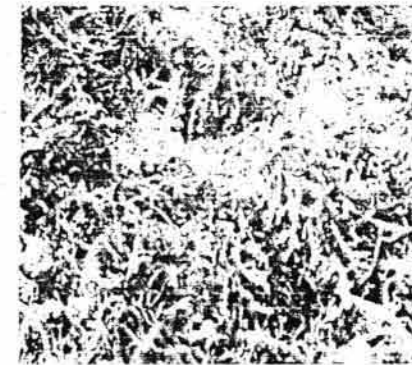
Tata kelola pemerintahan yang baik adalah tujuan yang hendak dicapai dalam pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu maka pembenahan di bidang hukum telah banyak mendapatkan perhatian selama beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, implementasi berbagai produk hukum yang telah dihasilkan perlu lebih ditingkatkan untuk menjamin tumbuhnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mewujudkan kepastian hukum bagi semuanya. Tingkat kepedulian aparat pemerintah terhadap produk hukum juga masih perlu ditingkatkan agar keberadaan hukum benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam bidang pemerintahan, reformasi birokrasi pemerintahan dilakukan secara terus menerus dan konsisten. Ke depan, arah reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan transformasi pola pikir dari pola pikir birokratik ke pola pikir kewirausahaan pada jajaran aparat pemerintah daerah hingga ke jajaran staf paling bawah sesuai dengan tuntutan era globalisasi. Tujuan utamanya adalah terciptanya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Selain transformasi pola pikir tersebut di atas yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah mengembangkan desain organisasi dan satuan kerja perangkat daerah yang lebih baik dan lebih tepat sehingga mampu merespon berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

11. Industri dan Perdagangan

Sejauh ini, sektor industri kecil dan menengah cukup mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Pertimbangannya adalah karena dalam sektor ini terserap cukup banyak tenaga kerja. Pada tahun 2005 sektor industri kecil dan menengah mampu menyerap 123.675 orang tenaga kerja sementara industri skala besar hanya menyerap 5.332 orang tenaga kerja. Selain itu industri kecil dan menengah juga sangat rentan akan resiko kebangkrutan, terbatasnya akses modal dan rendahnya kualitas tenaga kerja serta lemahnya manajemen.



Sampai dengan tahun 2005, pelaku usaha sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang berkembang dan terus mendapat pembinaan sebanyak 22.959 unit usaha dengan nilai produksi mencapai Rp.1,92 Trilyun. Menurut jenisnya sebagian besar sektor ini bergerak pada bidang industri hasil pertanian.



Tabel 6. Volume dan Nilai Perdagangan Antar Pulau Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2006

No.	Jenis Komoditas	Volume	Nilai (Rp)
1.	Tanaman Pangan	105.513 Ton	2.062.721.772,-
2.	Perkebunan	12.531.180 Ton	66.190.281.123,-
3.	Peternakan	6.062 Ekor	11.998.066.338,-
4.	Kehutanan	15.408.638 M3	13.022.882.099,-
5.	Perikanan	7.133.402 Ton	36.240.915.972,-
Jumlah			129.514.867.304,-

Sumber Data : Sultra Dalam Angka 2007

Keadaan perdagangan di Sulawesi Tenggara menunjukkan geliat yang cukup signifikan, terutama jika dilihat dari perdagangan antar pulau yang meliputi berbagai komoditas hasil-hasil tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan dimana nilainya pada tahun 2006 mencapai Rp. 129,5 Milyar.

Perkembangan ekspor di Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2004-2006 nampak berfluktuasi. Pada Tahun 2004, volume ekspor mencapai 248.813 ton. Pada tahun 2005, volume ekspor meningkat menjadi 1.320.537 ton dan pada tahun 2006 menurun sekitar 13,96 % menjadi 1.136.235 ton. Sedangkan nilai ekspor pada tahun 2004 adalah sebesar US \$ 164,65 juta dan pada tahun 2005 turun sekitar 15,51 % menjadi sebesar US \$ 139,11 juta. Pada tahun 2006 nilai ekspor meningkat kembali menjadi sebesar US \$ 397,43 juta sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 7. Realisasi Ekspor Berbagai Jenis Komoditi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2006

Jenis Komoditi	Nilai Ekspor (US \$ Juta)		Keterangan
	2004	2006	
Pertambangan	124,42	377,63	Meningkat
Hasil Perikanan	22,57	0,49	Menurun
Hasil Perkebunan	10,84	19,28	Meningkat
Hasil Industri	6,80	-	Menurun
Total	164,65	397,41	Meningkat

Sumber Data : Sultra Dalam Angka 2007

II.12. Sosial Budaya Daerah

a. Penduduk dan Tenaga Kerja

Karakteristik demografis Sulawesi Tenggara ditandai dengan penyebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata, kepadatan penduduk yang rendah, pertumbuhan penduduk yang melampaui angka nasional, struktur penduduk yang berbentuk piramidal dan angka ketergantungan (*dependency ratio*) yang cukup tinggi yang kesemuanya perlu mendapat perhatian yang lebih seksama.

Tabel 8. Sebaran dan Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota Tahun 2007

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk				Luas Wilayah (KM2)	Kepadatan (Jiwa/Km)
		KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Konawe	57.964	121.230	119.348	240.578	6.568,15	37
2	Kolaka	67.180	140.845	135.860	276.705	6.918,38	40
3	Muna	68.453	125.869	131.004	256.873	2.041,24	126
4	Buton	63.013	137.521	140.923	278.444	2.648,08	105
5	Kota Kendari	48.000	129.089	127.886	256.975	391,57	656
6	Kota Bau Bau	30.701	66.325	64.903	131.228	221,00	594
7	Konawe Selatan	65.276	123.906	120.590	244.496	5.779,47	42
8	Kolaka Utara	24.873	60.737	60.101	120.838	3.391,13	36
9	Bombana	30.757	58.422	59.425	117.847	2.961,08	40
10	Wakatobi	26.270	48.170	49.395	97.565	822,13	119
11	Buton Utara	12.475	26.106	26.187	52.393	1.959,03	27
12	Konawe Utara	10.384	22.215	21.399	43.614	5.101,76	9
Jumlah		505.346	1.060.435	1.057.021	2.117.456	38.140,00	55

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Sultra

Sampai dengan tahun 2007, Kabupaten Buton merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar, disusul Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-bau, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara dan terakhir Kabupaten Konawe Utara.

Dilihat dari kepadatan penduduk masing-masing kabupaten/kota maka Kota Kendari merupakan daerah dengan kepadatan tertinggi disusul dengan Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Utara dan terakhir Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 9. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2000-2007

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)	Jumlah KK	Penduduk Per - RT
2000	1.776.292	-	394.925	4,5
2001	1.815.548	2,21	415.168	4,4
2002	1.915.326	0,21	431.648	4,4
2003	1.919.273	- 0,42	442.577	4,3
2004	1.911.103	2,26	431.648	4,4
2005	1.960.697	2,10	437.594	4,5
2006	2.001.818	5,78	446.440	4,5
2007	2.117.456	-	505.346	4,2
Rata-rata		2,74		

Sumber : Sultra Dalam Angka 2007

Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara pertahun dalam periode tahun 2000 – 2007 rata-rata mencapai 2,74 %. Perkembangan ekonomi Sulawesi Tenggara yang cenderung meningkat telah memicu migrasi masuk terutama pedagang maupun pengusaha atau bahkan penganggur dari daerah lain yang datang dengan maksud mencari pekerjaan. Perkembangan infrastruktur pemerintahan dan perekonomian yang semakin signifikan menjadi faktor penyebab terjadinya migrasi. Bahkan terdapat kesan bahwa daerah ini telah menjadi tujuan pencari kerja. Disamping itu, mobilitas penduduk juga semakin tinggi akibat semakin berkembangnya infrastruktur dan transportasi . Ke depan, perlu diupayakan untuk membatasi peningkatan jumlah penduduk melalui berbagai kebijakan yang tepat dan terarah.

Ratio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Ratio jenis kelamin menggambarkan banyaknya penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk perempuan. Untuk Sulawesi Tenggara terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan dengan ratio 100,32 yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

Dampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan diantaranya dapat terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi

penduduk tidak produktif (penduduk muda umur 0-14 tahun dan penduduk tua umur 60 tahun atau lebih) atau semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Tabel 10. Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja, Angkatan Kerja Yang Bekerja serta Angkatan Kerja Yang Mencari Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2006

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	Jumlah AK yang bekerja (Jiwa)	Jumlah AK yang Mencari Pekerjaan (Jiwa)	Prosentase (%)
2003	1.919.273	873.842	791.420	82.421	9,43
2004	1.911.103	914.229	828.774	85.455	9,34
2005	1.960.697	958.072	853.354	104.718	10,93
2006	2.001.818	924.763	835.322	89.441	9,67

Sumber : Sultra Dalam Angka 2007

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui perbandingan antara penduduk yang termasuk kategori Angkatan Kerja yang bekerja pada berbagai lapangan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk diluar kategori tersebut mencapai 72 %. Artinya setiap 72 orang penduduk yang bekerja juga menanggung 100 penduduk lainnya yang tidak bekerja.

Pada tahun 2006, jumlah penduduk yang termasuk kategori Angkatan Kerja sebanyak 924.763 jiwa atau 46,24 % dari jumlah penduduk. Dari jumlah Angkatan Kerja tersebut yang bekerja sebanyak 835.322 jiwa dan yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 89.441 jiwa atau sekitar 9,67 % dari jumlah Angkatan Kerja. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Sulawesi Tenggara masih relatif tinggi.

Tabel 11. Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Pada Berbagai Lapangan Pekerjaan Tahun 2006

No	Lapangan Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Pertanian	502.472	60,15
2.	Perdagangan	114.991	13,77
3.	Jasa-jasa	78.703	9,42
4.	Industri Pengolahan	59.341	7,10
5.	Transportasi/Komunikasi	46.915	5,62
6.	Bangunan	22.329	2,67
7.	Keuangan	4.381	0,52
8.	Lainnya	6.189	0,75
Jumlah		835.322	100,00

Sumber : Sultra Dalam Angka 2007

Jumlah Angkatan Kerja pada Tahun 2007 835.322 jiwa, sebagian besar yakni 60,15 % diserap pada sektor pertanian Disusul kemudian oleh sektor perdagangan yang menyerap sekitar 114.991 jiwa atau sekitar 13,77% dan sektor jasa-jasa yang menyerap sekitar 78.703 jiwa atau sekitar 9,42% sedangkan sektor-sektor lainnya menyerap antara 0,52 – 7,10 % dari jumlah angkatan kerja yang bekerja.

Tabel 12. Sebaran Angkatan Kerja Yang Bekerja dan Mencarai Kerja Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2006

No.	Kualifikasi	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	Jumlah AK yang berkerja (Jiwa)	Jumlah AK yang Mencari Pekerjaan (Jiwa)
1	Tidak Tamat SD	172.253	159.946	12.307
2	Tamat SD	274.880	251.714	23.166
3	Tamat SMTP	179.258	161.975	17.283
4	Tamat SMTA Umum	176.132	149.671	26.461
5	Tamat SMTA Kejuruan	45.227	40.759	4.468
6	Diploma I & II	20.276	19.039	1.237
7	Akademi/Diploma III	10.451	9.383	1.068
8	Universitas	46.286	42.835	3.541
Jumlah		924.763	835.322	89.441

Sumber : Sultra Dalam Angka 2007

Apabila dilihat dari kualifikasi pendidikannya, maka sekitar 48,35 % dari Angkatan Kerja yang bekerja hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau tidak tamat Sekolah Dasar. Kondisi ini menunjukkan relatif rendahnya kualitas tenaga kerja di daerah ini. Demikian pula dengan Angkatan Kerja yang sedang mencari pekerjaan dimana sekitar 40 % diantaranya hanya berpendidikan Sekolah dasar atau tidak tamat Sekolah Dasar.

b. Profil Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator. Indikator dasar adalah kemampuan membaca dan menulis yang dilihat dari besaran angka buta aksara yaitu persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin atau huruf lainnya terhadap total jumlah penduduk.

Angka Buta Aksara di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 mencapai 3,76% dan pada tahun 2006 menurun menjadi 3,63 %. Seiring dengan upaya pemberantasan buta aksara yang terus dilakukan maka pada tahun 2007 angka buta aksara menurun menjadi 3,12 % dari jumlah penduduk atau sekitar 66.140 jiwa.

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan mencerminkan kualitas siap pakainya sumberdaya manusia yang ada. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka semakin baik kualitas SDM yang tersedia. Kualitas ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk berumur 10 tahun ke atas yang dapat ditamatkan dimana persentase terbesar adalah tamatan Sekolah Dasar yang mencapai 22,34 % atau 447.133 jiwa.

Untuk mengetahui seberapa besarnya tingkat partisipasi penduduk menurut jenjang pendidikan yang diikuti, diperlukan suatu indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah menurut jenjang pendidikan (SD, SLTP, SLTA) dengan cara membandingkan penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan tersebut. Angka ini dapat dibedakan antara Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Perbedaan yang mendasar antara APK dan APM adalah jumlah penduduk yang bersekolah ke jenjang tertentu dalam APK tanpa melihat usia sesuai jenjang pendidikan, sedangkan dalam APM, jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang tertentu dengan batasan usia/kelompok umur sesuai jenjang sekolah.

Tabel 13. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007

No.	Kabupaten/Kota	APM SD/MI	APK SMP/MTs	APK SMA/MA
1	Kota Kendari	95,63	92,76	74,81
2	Konawe	95,68	92,48	60,41
3	Kota Bau Bau	95,59	92,11	70,21
4	Muna	95,39	92,31	55,82
5	Konsel	94,40	91,96	57,19
6	Kolaka	90,68	90,23	55,95
7	Buton	92,23	92,82	57,27
8	Wakatobi	90,46	91,91	56,52
9	Kolaka Utara	90,46	91,08	42,37
10	Bombana	92,61	91,49	46,37
11	Buton Utara	93,53	90,53	36,18
12	Konawe Utara	90,46	91,53	36,99
Total		93,07	91,77	54,17

Sumber : Dinas P dan K Prov. Sultra

Pada tahun 2007, APM SD/MI Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai 93.07 % dimana APM tertinggi meliputi Kabupaten Konawe, Kota Kendari dan Kota Bau-Bau yang mencapai lebih dari 95 %. Untuk APK SMP/MTs Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 91,77 % dimana APK tertinggi meliputi Kota Kendari, Kota Bau Bau, Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton dan

Kabupaten Muna yang mencapai lebih dari 92%. Untuk APK SMA/MA Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 54,17 % dimana APK tertinggi meliputi Kota Kendari dan Kota Bau-bau yang mencapai lebih dari 70%. APM/APK terjadi di level SD, kemudian SLTP dan SLTA. Walaupun terjadi perbedaan yang nyata antara besaran APK dan APM di level SD adalah wajar karena adanya program wajib belajar, sehingga dapat dipastikan semua penduduk bersekolah di SD.

Peningkatan *school enrollment* (lama sekolah) perlu mendapat perhatian. Lama sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara rata-rata hanya sekitar 7,3 tahun yang menunjukkan bahwa kemampuan belanja pendidikan oleh masyarakat relatif rendah. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan sulit dilaksanakan jika *school enrollment* relatif rendah sehingga terobosan pendidikan perlu dilakukan untuk meningkatkan *life skill* masyarakat

II.13. Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari empat indikator yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI), Usia Harapan Hidup (UHH) dan Status Gizi Anak Balita. Pada tahun 2002, AKB di Provinsi Sulawesi Tenggara 67 per seribu kelahiran hidup dan mengalami penurunan menjadi 41 per seribu kelahiran hidup pada sedangkan tahun 2007. Demikian juga AKI yang mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi 312 per 100.000 kelahiran hidup. Usia Harapan Hidup (UHH) menunjukkan perbaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2003, UHH telah mencapai 66 tahun, dan pada tahun 2006 telah mencapai 68,5 tahun (SDKI, 2002 dan SDKI 2007).

Berdasarkan indeks berat badan menurut umur (BB/U), rata-rata anak balita di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2005 diketahui bahwa balita status gizi kurang sebesar 19,34 persen, dan status gizi buruk 10,04 persen. Sedangkan pada tahun 2007, status gizi cenderung semakin baik yaitu status gizi kurang sebesar 18,2 persen, dan status gizi buruk sebesar 3,5 persen (Laporan Dinas Kesehatan Prov. Sultra, 2007).

Tingginya angka kematian ibu disebabkan berbagai faktor diantaranya pendarahan, keracunan kehamilan dan infeksi. Kondisi ini akan lebih diperparah lagi dengan keadaan status gizi yang semakin buruk, faktor persalinan yang terlalu muda, paritas tinggi, anemi pada ibu hamil. Sedangkan tingginya angka kematian bayi disebabkan karena beberapa jenis penyakit infeksi termasuk diare dan keadaan gizi bayi.

Berdasarkan Laporan Surveilens Terpadu Penyakit berbasis Puskesmas, pada tahun 2006 di Sulawesi Tenggara penyakit masih didominasi oleh penyakit Influenza, Diare, Malaria klinis, Pneumonia, Tersangka TBC Paru, Diare berdarah, TBC Paru BTA (+), Tipus Perut Klinis, Kusta MB dan Malaria Vivax. Sedangkan menurut laporan Rumah Sakit, 10 penyakit utama di Rumah Sakit

adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Diare, Migren, Dispepsia, Gangguan Intraksi dan Akonologi, TB Paru BTA Positif, Bronkhitis, Gastritis, Forpagitis Akut, dan Malaria.

Penyelenggaraan surveilens terpadu bidang penyakit untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kembali penyakit rakyat (*re-emerging diseases*) dan juga mengantisipasi munculnya *New Emerging Diseases*. Hal ini terlihat dari kejadian penyakit yang sporadis maupun potensi terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), penyakit diare, ISPA, Malaria, Demam Berdarah dan berbagai penyakit lainnya yang pada tahun 2007 mencapai 143.216 kasus.

Status kesehatan sangat berkaitan erat dengan kemiskinan. Angka kematian bayi pada kelompok termiskin jauh lebih tinggi dibanding dengan kelompok terkaya. Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan anak balita, seperti ISPA (Pneumonia), diare, dan tetanus neonatorum, lebih sering terjadi pada penduduk miskin. Penyakit lain yang banyak diderita penduduk miskin adalah penyakit tuberkulosis paru, malaria dan HIV/AIDS, Filariasis dan Frambusia. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya (*cost barrier*). Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas.

II.14. Prasarana dan Sarana Daerah

Prasarana jalan dan jembatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, terutama dalam membentuk struktur ruang wilayah serta meningkatkan akses dari sentra-sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran. Prasarana jalan merupakan salah satu prasarana vital perekonomian daerah khususnya dalam mendukung kelancaran proses koleksi dan distribusi barang dan jasa.

Pada tahun 2007, total panjang jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 7.785,62 Km yang terdiri dari Jalan Negara sepanjang 1.293,87 Km, Jalan Provinsi sepanjang 488,80 Km, Jalan Kabupaten sepanjang 6.002,95 Km. Berdasarkan peranannya, Jalan Negara dan Jalan Provinsi sepanjang 1.782,67 Km terdiri dari Jalan Arteri sepanjang 434,31 Km, Jalan Kolektor-1 sepanjang 854,56 Km dan serta Jalan Kolektor-2 sepanjang 488,80 Km. Permasalahan jalan yang utama adalah terbatasnya jaringan jalan serta belum memadainya daya dukung dan dimensi jalan sehingga kurang mampu mengimbangi pesatnya arus angkutan.

Dalam menunjang produktivitas angkutan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara, telah tersedia beberapa pelabuhan laut yang berfungsi sebagai pelabuhan akumulasi yang meliputi :

1. Pelabuhan Kelas III yang terdiri dari Pelabuhan Kendari dan Bau-bau.
2. Pelabuhan Kelas IV yang meliputi Pelabuhan Pomalaa.

3. Pelabuhan Kelas V yang meliputi Pelabuhan Kolaka, Raha dan Langara.

Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa transportasi laut yang ada belum dapat diwujudkan sebagai main outlet. Kondisi demikian disebabkan oleh belum lengkapnya prasarana pelabuhan dan kondisi angkutan lanjutan relatif belum mendukung. Untuk menjembatani peningkatan aksesibilitas angkutan penyeberangan maka telah dikembangkan pelabuhan penyeberangan Kolaka, Torobulu, Tampo, Bau-bau, Waara, Kendari, Wawonii, Lasu-sua, Toniat, Dongkala, Mawasangka, Wanci dan Kamaru.

Gambar 4. Sarana dan Prasarana Perhubungan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk mendukung kelancaran angkutan udara maka tersedia beberapa Bandar Udara yang telah digunakan maupun yang sedang dikembangkan. Bandar Udara Wolter Monginsidi merupakan Bandar Udara Utama dan terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian Bandara Betoambari Bau-bau telah dioperasikan untuk kepentingan umum. Bandara Marango di Tomia digunakan untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan. Beberapa Bandara yang sedang dikembangkan meliputi Bandara Tangketada di Kabupaten Kolaka, Bandara Wakatobi di Wanci serta Bandara Sugimanuru di Kabupaten Muna.

Ada tiga Satuan Wilayah Sungai (SWS) dengan 97 aliran sungai yang meliputi SWS Lasolo – Sampara, SWS Toari – Lasalimu dan SWS Poleang – Roraya. Hingga saat ini di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 96 buah



Bendung/Daerah Irigasi (DI) dengan rincian 33 buah Irigasi Teknis dan 63 buah Irigasi Non Teknis. Potensi Daerah Irigasi yang ada seluas 139.326 Ha dan secara fungsional telah mencapai 82.039

Ha. Dari luas fungsional tersebut di atas, sekitar 29.542 Ha berupa sawah Irigasi Teknis dan 12.192 Ha berupa sawah Irigasi Non Teknis.

Secara keseluruhan, prasarana irigasi tersebut di atas mampu mendukung peningkatan produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Untuk itu maka akan senantiasa diupayakan peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun yang disertai dengan upaya pelestarian sumberdaya air dengan menjaga kelestarian hutan di Daerah Aliran Sungai.

Penyediaan energi listrik di Sultra dilakukan oleh PLN dengan daya mampu pembangkit 61,07 MW. Kondisi tersebut masih jauh dari kebutuhan listrik saat ini yang diperkirakan mencapai 150 MW. Rasio elektrifikasi baru sebesar 37,16% lebih rendah dari rasio elektrifikasi nasional yaitu 56%. Desa berlistrik berjumlah 65,25% dari 1.980 desa/kelurahan yang ada. Di sisi lain potensi energi yang dapat dikembangkan untuk pembangkit listrik cukup banyak tersedia seperti potensi energi air Sungai Lasolo yang diperkirakan mampu membangkitkan listrik sebesar 90 MW, Sungai Lalindu 100 MW, Sungai Konawehea 24 MW serta beberapa potensi energi air berskala mikrohidro dan minihidro yang tersebar di wilayah Kabupaten Buton, Muna, Bombana, Buton Utara, Kolaka dan Kolaka Utara.

Pada tahun 2013 rasio elektrifikasi ditargetkan dapat meningkat menjadi minimal 50% dan jumlah desa berlistrik mencapai 80%. Dalam jangka panjang dan menengah pembangunan ketenagalistrikan diupayakan melalui kerjasama dengan para pihak termasuk PLN dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan pembangkit listrik non diesel yaitu pembangkit listrik tenaga air baik skala mikrohidro (0 - 200 KW), minihidro (200 KW - 2 MW) maupun skala besar PLTA (> 2 MW) dengan sumber pembiayaan APBD, APBN maupun swasta. Daya listrik yang dihasilkan dijual kepada PLN untuk disalurkan ke konsumen. Pada sistem Kendari PLN akan mendapat tambahan pasokan daya listrik melalui pembangunan PLTU berbahan bakar batu bara berkapasitas 2x10 MW yang akan dibangun oleh pihak swasta sebagai *Independent Power Producer (IPP)*. Saat ini telah dilakukan negosiasi kontrak jual beli tenaga listrik dengan PLN dan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2009 yang diperkirakan dapat beroperasi pada tahun 2012.

Dalam jangka pendek (1-2 tahun), krisis listrik yang berdampak pada pemadaman bergilir khususnya di Kota Kendari (Wilayah Kerja PLN Cabang Kendari) diupayakan dapat diatasi melalui penambahan kapasitas pembangkit dengan merelokasi mesin pembangkit PLN dari wilayah di luar Sultra. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkontribusi atas biaya relokasi dan pemasangan pembangkit. Khusus untuk daerah perdesaan terpencil dan terisolir yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN akan terus diupayakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan sumber pembiayaan APBD maupun bantuan pemerintah pusat. Pengelolaan PLTS akan dilakukan oleh lembaga pengelola PLTS yang keanggotannya dari unsur

masyarakat penerima PLTS (*Project Management Unit*) sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat lokal.

Dalam upaya peningkatan penyediaan listrik oleh PLN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat mendukung dan terus mengupayakan mendorong peningkatan status PLN di Sultra menjadi PLN Wilayah tersendiri. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah dan PLN Pusat serta Komisi DPR yang menyangkut Energi. Diharapkan apabila hal ini dapat diwujudkan akan memudahkan koordinasi pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tenggara.

II.15. Potensi Sumber Daya Alam

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Potensi pertanian dalam arti luas merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sebagian besar mata pencaharian penduduk bertumpu pada sektor ini. Lahan pertanian yang ada sebahagian besar diusahakan oleh masyarakat untuk pengembangan sejumlah komoditi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

Sebahagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan areal potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian. Sektor pertanian dalam arti luas merupakan sektor penggerak utama peningkatan perekonomian masyarakat yang diarahkan agar mampu membawa efek ganda terhadap sektor-sektor lain. Luas sawah telah mencapai 91.113 Ha dengan produksi padi mencapai 349.430 ton pertahun. Prioritas pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diproyeksikan pada komoditi unggulan dengan tidak meninggalkan pengembangan komoditi lainnya.

Penggerak perekonomian Sulawesi Tenggara lainnya adalah sektor perikanan dan kelautan yang menjadi salah satu modal dasar pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Luas perairan laut mencapai 114.876 Km² dengan panjang garis pantai 1.740 Km. Potensi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan usaha perikanan tangkap maupun kegiatan budidaya.

Potensi perikanan tangkap mencapai 350.000 ton pertahun. Tetapi produksinya saat ini baru mencapai 215.000 ton atau 61,43 % dari potensi yang tersedia. Potensi ini seharusnya dapat dikembangkan secara maksimal jika aktivitas *illegal fishing* dapat diberantas. Potensi perikanan budidaya mencakup budidaya laut, air payau dan air tawar. Potensi perikanan darat sebesar 10.000 ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan baru sekitar 41 %. Dengan demikian nampak bahwa potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu pengembangan investasi pada bidang ini cukup terbuka lebar.

Total luas hutan di Sulawesi Tenggara adalah 2.600.000 Ha yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi dan hutan konversi. Investasi di bidang kehutanan yang prospektif adalah pengembangan hutan tanaman industri pada areal tertentu. Potensi lainnya adalah pengembangan industri hasil hutan seperti industri meubel berbahan kayu, rotan, industri tenun, industri anyam-anyaman serta industri lebah madu. Dalam rangka menjaga kelestariannya, pengembangan hutan produksi harus diikuti dengan penanaman kembali agar tidak terjadi degradasi hutan sehingga kelangsungan produksi tetap terjaga dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Jenis komoditi ternak yang diusahakan di Provinsi Sulawesi Tenggara mencerminkan keunggulan potensi sub sektor peternakan. Pada tahun 2006 populasi unggas mencapai 8.056.313 ekor, populasi sapi sebesar 222.350 ekor, khusus sapi potong produksi yang dihasilkan mencapai 18.349 ekor dan ekspor antar pulau sebanyak 2.709 ekor.

Gambar 5. Potensi Pertanian dan Kehutanan



alam bidang pertambangan potensi yang ada mencakup sejumlah bahan galian mineral yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti emas, nikel, marmer, aspal, dan lain-lain serta indikasi kandungan batubara dan minyak bumi yang masih memerlukan eksplorasi rinci dan penelitian lebih lanjut.

Pengusahaan pertambangan di Sultra dilakukan oleh 3 perusahaan raksasa yaitu PT. Antam, PT. INCO, dan PT. Rio Tinto dan ratusan perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan nikel.

Untuk pengusahaan tambang aspal di P. Buton juga terdapat lebih dari 30 perusahaan pemegang izin Kuasa Pertambangan termasuk yang selama ini telah beroperasi yakni:

1. PT. Sarana Karya dengan KP Eksploitasi seluas 318.526 Ha di Kabungka dan seluas 100 Ha di Lawele.
2. PT. Olah Bumi Elcipta dengan KP Eksploitasi seluas 1.056,45 Ha di Kabungka, 100 Ha di Lawele, 97,69 Ha di Rongi dan seluas 1.182,36 di Lawele Utara.

3. Asia Werks Global Investment Group dengan KP Eksplorasi seluas 1.648 Ha di Kabungka dan seluas 1.189 Ha di Lawele.

Walaupun telah cukup banyak perusahaan yang berinvestasi di bidang pertambangan di Sulawesi Tenggara, namun demikian kehadiran perusahaan tersebut terutama ketiga perusahaan raksasa yaitu PT. INCO, Tbk, PT. ANTAM, Tbk (Persero) maupun PT. RIO TINTO dinilai belum memberikan kontribusi yang adil dan signifikan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Bahkan dengan meningkatnya investasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral khususnya nikel, menimbulkan masalah tersendiri seperti adanya tumpang tindih Kuasa Pertambangan, wilayah KP yang berada dalam kawasan hutan lindung, adanya penolakan masyarakat lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap kehadiran investor tambang dan sebagainya.

Dalam periode 2008-2013 pengelolaan bahan galian mineral diharapkan dapat menjadi penggerak utama pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Pengusahaan tambang harus sustainable, memperhatikan kelestarian lingkungan serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah melalui penyetoran pajak dan retribusi daerah serta sumbangan pihak ketiga yang merupakan persentase atas keuntungan bersih perusahaan dalam rangka mendukung Program **BAHTERAMAS**. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat diupayakan adanya peningkatan kontribusi perusahaan tambang dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan melalui peningkatan dana *Community Development* dan dana-dana sosial lainnya.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah dan *multiplier effect*, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan mewajibkan agar bahan galian yang diekspor dalam bentuk konsentrat dengan kadar yang jelas. Dengan demikian bahan galian tambang yang dieksploitasi harus terlebih dulu dilakukan pengolahan.

Untuk memudahkan pengawasan akan dibangun instrumen pengawasan yang disebut outlet-outlet produksi tambang di sentra-sentra pertambangan nikel dan aspal yang dilengkapi dengan pembangunan dermaga khusus, laboratorium uji material, pelataran penimbunan material, penataan pemukiman dan sarana sosial ekonomi, pengembangan regulasi dan pengembangan sumber energi alternatif setempat. Sumber pembiayaannya merupakan sharing antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan investor tambang. Daerah yang memungkinkan direncanakan berlokasi di Kabupaten Konawe Utara, Kolaka Utara dan P. Kabaena di Kabupaten Bombana. Sedangkan untuk outlet produksi tambang aspal yaitu di Lawele Kabupaten Buton.

Pada beberapa waktu yang lalu dalam tahun 2008 telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik Stainless Steel di Tapungaya Kabupaten Konawe Utara dan diperkirakan

dapat beroperasi 5 tahun yang akan datang. Total investasinya mencapai Rp 8 T (delapan triliun rupiah) yang merupakan patungan antara PT. Antam, Tbk dengan PT. Jindan India. Kehadiran pabrik baja ini diharapkan selain dapat menciptakan lapangan kerja juga akan meningkatkan pendapatan daerah. Saat ini sedang diupayakan agar Pemerintah Daerah mempunyai saham dalam persentase yang wajar. Pada tahun 2009 PT. Rio Tinto juga akan membangun pabrik di Kolaka dengan total investasi mencapai Rp. 10 T (sepuluh triliun rupiah) dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2012. Perusahaan ini diprediksi memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Konawe masing-masing sebesar US\$ 5 juta dengan jaminan adanya kepastian hukum terhadap lahan-lahan yang menjadi wilayah konsesinya.

Untuk menghindari adanya kasus tumpang tindih wilayah pertambangan dan adanya wilayah KP dalam kawasan hutan lindung, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan penataan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang ekstra ketat terhadap penerbitan Kuasa Pertambangan oleh kabupaten/kota agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan.

Pada bidang perkebunan, potensi lahan yang mempunyai peluang untuk dikembangkan juga cukup menjanjikan. Produksi perkebunan yang telah berkembang meliputi kakao, mete, cengkeh, kelapa, kopi, lada, kemiri dan vanili. Komoditi kakao dan mete merupakan komoditi andalan yang cukup berperan dalam skala perekonomian nasional. Adapun rencana dan realisasi investasi di bidang perkebunan, seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14. Rencana Investasi Swasta di Bidang Perkebunan

No.	Perusahaan	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Lokasi
1.	PT. Marketindo	Tebu	20.000	Kec. Landonu, Kab. Konawe Selatan
2.	PT. Cipta Agung Manis	Tebu	20.000	Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan
3.	PT. Jaya Lestari	Sawit	20.000	Kec. Watubangga, Kab. Kolaka
4.	PT. Sultra Prima Lestari	Sawit	6.000	Kec. Asera, Wiwirano, Kab. Konawe Utara
5.	PTP. Nusantara XIV	Sawit	6.000 (inti) 20.000 (plasma)	Kec. Asera, Wiwirano, Kab. Konawe Utara
6.	PT Tanjung Bukit Makmur	Sawit	20.000	Kec. Asera, Wiwirano, Kab. Konawe Utara



Sumber : Dinas Perkebunan dan Hortikultura Tahun 2007
Potensi pariwisata, wilayah Sulawesi Tenggara secara umum dapat dibedakan atas pariwisata laut dan budaya yang juga merupakan ciri khas daerah di Sulawesi Tenggara. Salah satu diantaranya adalah potensi wisata laut di Kabupaten Wakatobi yang terkenal dengan keindahan karang bawah laut. Selain itu juga terdapat potensi wisata Pantai Nirwana-Kota Bau-Bau, Pulau Bokori Kabupaten Konawe dan danau Napabale di Kabupaten Muna.



Gambar 6. Potensi Pariwisata Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara

Potensi budaya yang merupakan obyek wisata adalah keraton Buton di Kota Bau-Bau, serta kesenian tradisional suku bangsa yang terdapat di Sulawesi Tenggara seperti suku Tolaki, Buton, Muna, Moronene dan lain-lain.

III.1. VISI

Berdasarkan uraian mengenai kondisi Provinsi Sulawesi Tenggara, masalah, peluang dan tantangan pembangunan ke depan maka visi pembangunan kami dalam membangun Sulawesi Tenggara periode Tahun 2008-2013 adalah :

MEMBANGUN KESEJAHTERAAN SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008-2013

Pernyataan visi sebagaimana dikemukakan mengandung makna dan implikasi sebagai berikut :

Sulawesi Tenggara adalah merupakan salah satu Provinsi yang terdiri atas jazirah dan kepulauan dengan potensi sumberdaya alam yang cukup melimpiah baik sumberdaya daya yang dapat diperbaharui (*Renewable resources*) di sektor kelautan, kehutanan, pertanian dalam arti luas serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*), seperti pertambangan. Sumberdaya yang tersedia, sebagaimana disebutkan pada dasarnya telah dikelola, tetapi belum optimal karena belum memberikan manfaat yang maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun dalam upaya peningkartan pendapatan daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk memanfaatkan sumberdaya daya yang tersedi dalam upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu dalam lima tahun ke depan yaitu periode 2008-2013, upaya-upaya konkrit akan dilakukan dengan **membangun** potensi sumberdaya yang tersedia untuk mencapai **kesejahteraan** masyarakat.

Membangun mengandung makna bangkit, berdiri, bersifat memperbaiki, membina, mendirikan atau mengadakan sesuatu. Sulawesi Tenggara dengan segala potensi yang dimiliki dan seperti yang telah dikelola selama ini, masih perlu upaya-upaya yang lebih kuat lagi untk membangkitkan, mendirikan dan membina serta memafaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kesejahteraan mengandung makna keamanan dan keselamatan, kesenangan hidup dan kemakmuran. Sedang **sejahtera** yang merupakan kata dasar dari kesejahteraan mengandung makna aman, sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala kesukaran serta selamat tak kurang satu apapun.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan maka **MEMBANGUN KESEJAHTERAAN** dimaksudkan adalah dalam rangka memperbaiki, membina serta membangkitkan suatu perikehidupan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur dengan mengutamakan pendekatan yang bertumpu pada pembangunan manusia (*people centred*), pembangunna pusat-pusat pertumbuhan (*growth centred development*) dan pengembangan kawasan tumbuh cepat serta pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Sebagaimana diketahui bahwa melalui beberapa pendekatan pembangunan yang telah dilakukan oleh para pendahulu, maka secara visual Sulawesi Tenggara bukanlah termasuk Provinsi yang tertinggal, karena beberapa komoditas yang ebrasal dari Sulawesi Tenggara telah dikenal di pasar nasional bahkan di pasar internasional. Tetapi dilain pihak harus juga diakui bahwa beberapa sektor yang masih perlu dikembangkan agar dapat mengejar keteringgalan atau menyamai provinsi lainnya yang telah berkembang.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini secara umum juga telah memberikan manfaat dalam pembangunan daerah dan juga pembangunna kesejahteraan masyarakat secara umum. Tetapi juga harus diakui bahwa masih ada sektor-sektor yang perlu ditingkatkan, termasuk sektor-sektor yang secara langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang lebih berpihak pada masyarakat, pembangunan pelayanan masyarakat secara cepat dan menyenangkan (pelayanan prima), penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan yang mampu memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur perhubungan yang memungkinkan tersedianya jasa transportasi secara murah (terjangkau), aman dan nyaman, serta membangun pemerintahan yang melayani masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Kesemua ini merupakan upaya-upaya yang perlu dipercepat dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Oleh karena itu periode pembangunan Sulawesi Tenggara 2008-2013, merupakan periode **Membangun Kesejahteraan Masyarakat** secara nyata melalui 1) Pengembangan kualitas Sumbmerdaya Manusia, 2) Revitalisasi Pemerintahan Daerah, 3) Pembangunan Ekonomi yang ditekankan pada pembangunan ekonomi masyarakat dengan pendekatan produksi serta 4) Pengembangan Sosial Budaya dan 5) Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk mendukung pembangunan ekonomi rakyat dan pelayanan pemerintahan. Upaya-upaya ini akan diuraikan dalam misi pembangunan yang juga merupaka agenda utama pembangunan periode Tahun 2008-2013.

III.2. MISI

Untuk merealisasikan visi pembangunna sebagaimana diuraikan, maka akan dikembangkan tiga agenda yang juga merupakan misi pembangunan yaitu :

1. **Pembangunan Kualitas Sumberdaya Manusia** ; dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat untuk pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, sehingga dapat menciptakan insan yang memiliki kualitas intelektual dan kualitas jasmani serta rohani yang baik.
2. **Revitalisasi Pemerintahan Daerah** ; dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta aparat pemerintahan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat serta bersih dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.
3. **Pembangunan Ekonomi** ; dimaksudkan untuk membangun perekonomian masyarakat secara nyata melalui usaha-usaha pragmatis dengan mendorong pembangunan sektor riil, berdasarkan potensi yang berada disekitarnya.
4. **Pembangunan kebudayaan** ; dimaksudkan untuk mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, mengembangkan dan memperkuat citra dan identitas daerah serta mendorong sektor pariwisata yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya potensi budaya setempat.
5. **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur** ; dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur wilayah secara terpadu dan mengembangkan infrastruktur perekonomian yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan serta simpul-simpul tataniaga dan mengembangkan infrastruktur pemerintahan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

IV.1. Strategi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi **BANK-SEJAHTERA** dan menjalankan misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 ditempuh 4 (empat) strategi pembangunan daerah yaitu :

1. Pembangunan yang bertumpu pada manusia (*people centered development*)

Pembangunan yang berfokus pada masyarakat desa berdasarkan potensi yang dimilikinya, melalui prinsip-prinsip pembangunan manusia yaitu :

Produktivitas : masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh pendapatan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian penting dari pembangunan manusia.

Ekuitas : masyarakat harus memiliki akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

Kesinambungan : akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Untuk itu maka segala bentuk permodalan fisik dan lingkungan hidup harus terpenuhi.

Pemberdayaan : pembangunan harus dapat dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2. Pembangunan yang bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan (*growth center development*)

Pembangunan diarahkan pada terciptanya pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan potensi wilayah dengan target-target pertumbuhan ekonomi yang terukur, termasuk mengembangkan simpul-simpul ekonomi atau tata niaga untuk menghimpun dan mendistribusikan komoditas atau produk dalam skala ekonomi tertentu.

3. **Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable development*)**

Pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan potensi sumberdaya alam dalam rangka optimalisasi pemanfaatan secara berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumberdaya alam yang menjamin tetap terpeliharanya fungsi-fungsi ekosistem dari suatu wilayah, terutama untuk memberikan jaminan akan keberlangsungan proses produksi dan pendapatan masyarakat.

4. **Pengarus-utamaan gender (*gender mainstreaming*)**

Peningkatan kemitra-sejajaran dan peran-serta perempuan di segala bidang pembangunan dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat kaum perempuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat.

IV.2. **Agenda Pembangunan Daerah**

Berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan daerah tersebut di atas maka ditetapkan 5 (lima) Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2008-2013 yaitu :

1. **Agenda I : Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia**, diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan yakni hak untuk memperoleh akses yang cepat, mudah dan murah atas kebutuhan pendidikan dan kesehatan dalam rangka terciptanya masyarakat yang berkualitas, baik kualitas intelektual, emosional, spiritual, fisik maupun kualitas teknisnya yang berorientasi kepada pengembangan produktivitas. Hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dalam bentuk bebas dari buta aksara, kebodohan, keterbelakangan dan putus sekolah. **Sedangkan hak-hak dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam bentuk hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai sehingga risiko penularan penyakit dan kekurangan gizi semakin berkurang.**
2. **Agenda II : Revitalisasi Pemerintahan Daerah**, diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengembangan kapasitas manajemen pemerintahan daerah, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
3. **Agenda III : Pembangunan Ekonomi**, diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, kekurangan pangan, sandang dan papan sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendapatan. Pembangunan ekonomi masyarakat ditekankan pada peningkatan akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi sehingga sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan

secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, diarahkan pula untuk meningkatkan keberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta membangkitkan industrialisasi. Untuk itu maka pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi adalah terpenuhinya hak untuk berusaha dan memperoleh lapangan kerja, hak untuk memperoleh akses permodalan, hak atas pengelolaan sumberdaya alam serta hak atas pemerataan distribusi barang dan jasa.

4. **Agenda IV : Pembangunan Kebudayaan**, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan keragaman budaya dan kekayaan budaya daerah serta meningkatkan apresiasi terhadap seni budaya daerah dan situs budaya daerah. Dengan upaya memperkokoh ketahanan budaya daerah akan mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif akibat pengaruh globalisasi informasi. Melalui pembangunan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi terciptanya identitas daerah dan memperkuat jati diri masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

5. **Agenda V : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar**, diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat dalam kerangka pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah dan antar wilayah. Pembangunan transportasi dilakukan secara terpadu dengan mengembangkan jaringan pelayanan antar moda dan intra moda. Pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumberdaya ekonomi dan sosial melalui pengelolaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi. Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan secara memadai serta pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik baru berbasis sumberdaya yang dapat diperbaharui.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN UMUM

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 akan dapat tercapai jika seluruh misi, agenda, pendekatan, strategi serta program-program pembangunan daerah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk itu maka segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara harus merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

V.1. Kebijakan Umum

Berkenaan dengan lima agenda yang akan dilaksanakan maka arah kebijaksanaan masing-masing agenda adalah sebagai berikut:

A. Agenda I : Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia

1. Sasaran pertama, meningkatnya cakupan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan dikembangkan adalah:

- a) Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh pelayanan pendidikan. Untuk memperkuat kebijaksanaan tersebut, akan dilakukan pembebasan biaya operasional pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat;
- b) Meningkatkan dan mengembangkan cakupan pendidikan dasar dan menengah yang ditujukan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Perbaikan manajemen setiap institusi pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus sehingga mampu mendukung terciptanya proses pendidikan yang berkualitas;
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan menengah yang ditujukan untuk meningkatkan penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para siswa. Pengenalan terhadap teknologi informatika yang lebih seksama sebagai langkah adaptasi terhadap pesatnya perkembangan IPTEK berwawasan global;

- d) Meningkatkan dukungan terhadap pengembangan pendidikan tinggi melalui kerja sama antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dan antar perguruan tinggi yang ada di daerah;
 - e) Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas.
2. Sasaran kedua, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,
- Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan dikembangkan adalah:
- a) Meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat terutama di daerah terpencil serta pengembangan dan realokasi fasilitas Rumah Sakit Umum (RSU) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pusat kesehatan rujukan yang memadai sesuai tuntutan perkembangan iptek kesehatan;
 - b) Mengembangkan sistem jaminan kesehatan masyarakat yang berprinsip keadilan sebagai pengejawantahan cara pandang dari paradigma sakit ke paradigma sehat sejalan dengan visi Indonesia Sehat 2010. Sejalan dengan komitmen tersebut akan ditingkatkan mutu pelayanan kesehatan perorangan lanjutan dengan prioritas pembebasan biaya pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Kabupaten/Kota dan RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c) Meningkatkan pemahaman akan pentingnya kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat guna terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari tatanan individu, keluarga dan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
3. Sasaran ketiga, meningkatnya kualitas moral dan akhlak.
- Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan dikembangkan adalah :
- a) Meningkatkan kapasitas spiritual masyarakat yang tercermin dari perilaku yang baik, taat kepada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sosial dan budaya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Meningkatkan kualitas penataan, pengelolaan dan pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama;

- c) Meningkatkan keserasian sosial dengan memanfaatkan kearifan lokal guna memperkuat hubungan-hubungan kelembagaan sosial kemasyarakatan.
4. Sasaran keempat, terjaminnya kemitraan sejajar dan peran wanita dalam segala bidang kehidupan.
- Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan dikembangkan adalah:
- a) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan kebijakan publik;
 - b) Meningkatkan kualitas kaum perempuan sehingga dapat berperan dalam berbagai kegiatan pembangunan;
 - c) Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak.

B. Agenda II : Revitalisasi Pemerintahan Daerah

1. Sasaran pertama : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab.
- Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan dikembangkan adalah:
- a) Menata kewenangan dan pengembangan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - b) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur agar lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
 - c) Meningkatkan efektifitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat;
 - d) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;
 - e) Meningkatkan kerjasama antar Pemerintah Daerah.
2. Sasaran kedua, meningkatnya kapasitas keuangan daerah.
- Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan dikembangkan adalah:
- a) Meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah;

- b) Meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas;
- c) Meningkatkan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah bawahan khususnya Pemerintah Desa/Kelurahan, melalui pengalokasian dana Bantuan Keuangan sebesar Rp.100.000.000.- setiap Desa/Kelurahan per tahun.

C. Agenda III : Pembangunan Ekonomi

1. Sasaran pertama, terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan dikembangkan adalah:

- a) Mengembangkan sistem informasi bisnis dan promosi investasi dalam rangka membangkitkan gairah investasi dan meningkatkan akses perdagangan termasuk kegiatan ekspor-impor;
- b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perizinan serta menjamin kepastian usaha.

2. Sasaran kedua, meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis komoditas.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan dikembangkan adalah:

a) Mengembangkan simpul-simpul komoditas berskala ekonomi guna menjamin kontinuitas proses produksi, koleksi dan distribusi produk-produk pertanian dan industri rakyat. Dalam rangka mengembangkan simpul-simpul komoditas tersebut, maka ditentukan pusat-pusat pertumbuhan dan perwilayahan komoditas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut

- (1) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Kakao di Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Bombana, Muna, Buton dan Buton Utara;
- (2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas jambu mete di Kabupaten Muna, Buton dan Bombana;
- (3) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Kelapa Sawit di Kabupaten Konawe Utara;

- (4) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Kelapa Dalam di Kabupaten Bombana, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Muna, Buton, dan Kolaka Utara;
- (5) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Merica/Lada di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara dan Bombana.
- (6) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Cengkeh di Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Utara dan Konawe Selatan;
- (7) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Padi Sawah di Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Bombana, Muna, Bau-Bau dan Buton Utara;
- (8) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Kacang Tanah di Kabupaten Muna, Konawe Utara, Konawe dan Buton Utara;
- (9) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Kedelai dan Jagung di Kabupaten Kolaka, Konawe Selatan, Buton, Konawe, Konawe Utara, Bombana dan Muna;
- (10) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Sapi dan Kambing di Kabupaten Muna, Buton Utara, Bombana, Konawe, Konawe Utara dan Kolaka;
- (11) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi, Buton, Bombana, Muna, Buton Utara, Konawe, Konawe Utara, Kota Bau-Bau, Kota Kendari dan Kolaka;
- (12) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Perikanan Budidaya di Kabupaten Wakatobi, Buton, Kota Bau-Bau, Muna, Konawe Selatan, Konawe, Konawe Utara, Kolaka, dan Kolaka Utara;
- (13) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan Wisata Laut di Kabupaten Wakatobi, Kota Bau-Bau, Konawe, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara dan Muna;
- (14) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan Wisata Budaya di Kabupaten Buton, Konawe, Muna, Kolaka dan Kota Bau-Bau;
- (15) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan Wisata Alam di Kabupaten Konawe Selatan dan Bombana;

- (16) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan Jasa-jasa di Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Muna, Buton dan Bombana;
 - (17) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas Pertambangan di Kabupaten Buton, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe Utara, Bombana, Muna dan Buton Utara.
- b) Mengembangkan sistem proteksi untuk melindungi sumber-sumber pendapatan masyarakat dan menyediakan subsidi untuk pengembangan usaha melalui kredit tanpa bunga;
 - c) Mengembangkan lembaga penjamin usaha yang ditekankan pada pemberian advokasi oleh lembaga penjamin untuk memberikan kepastian keberhasilan usaha;
 - d) Membina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi sehingga dapat berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ketahanan ekonomi wilayah.
3. Sasaran ketiga, meningkatnya produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah komoditi.
- Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan dikembangkan adalah:
- a) Mengembangkan usaha pertanian dalam arti luas dengan pendekatan kewilayahan dengan konsep agribisnis;
 - b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman;
 - c) Mengembangkan industri skala kecil dan menengah yang berbasis pada sumberdaya lokal khususnya agroindustri;
 - d) Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil dengan memperhatikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan.
- Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan dikembangkan adalah :
- a) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk mendukung kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat;
 - b) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pembentukan simpul-simpul tata niaga di Ibu Kota Kecamatan yang menghubungkan antara sentra-sentra produksi dengan sentra-sentra pemasaran;

- c) Mengembangkan telekomunikasi melalui pendirian telecenter di Ibu Kota Kecamatan yang berperan sebagai pusat informasi bisnis sehingga membentuk jaringan informasi bisnis regional;
- d) Mengembangkan jaringan air bersih wilayah pedesaan yang ditujukan untuk meningkatkan penyediaan air baku guna memenuhi kebutuhan masyarakat;
- e) Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi untuk kepentingan pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan;
- f) Mengembangkan diversifikasi pemanfaatan sumberdaya energi yang terbarukan guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

D. Agenda IV : Pembangunan Kebudayaan

1. Sasaran pertama, meningkatnya kemampuan daerah dalam pengelolaan keragaman budaya dan kekayaan budaya.

Adapun prioritas kebijaksanaan sebagai berikut :

- a) Mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat identitas daerah;
- b) Meningkatkan promosi kebudayaan daerah untuk memberi nilai ekonomi kebudayaan daerah sebagai salah satu komoditas kepariwisataan daerah.

2. Sasaran kedua, meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya daerah dan situs budaya daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan dikembangkan adalah :

- a) Mengembangkan seni budaya daerah melalui peran serta lembaga-lembaga kesenian masyarakat yang ada di daerah;
- b) Meningkatkan nilai tambah situs budaya daerah sehingga dapat menjadi obyek wisata andalan daerah.

E. Agenda V : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar

1. Sasaran pokok, meningkatnya infrastruktur kewilayahan untuk menunjang fungsi-fungsi elemen dasar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka prioritas kebijaksanaan yang akan dikembangkan adalah :

- a) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk mendukung kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat;
- b) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pembentukan simpul-simpul tata niaga di Ibukota Kecamatan yang menghubungkan antara sentra-sentra produksi dengan sentra-sentra pemasaran;
- c) Mengembangkan telekomunikasi melalui pendirian telecenter di Ibukota Kecamatan untuk berperan sebagai pusat informasi bisnis sehingga membentuk jaringan informasi bisnis regional;
- d) Mengembangkan jaringan air bersih wilayah pedesaan yang ditujukan untuk meningkatkan penyediaan air baku guna memenuhi kebutuhan masyarakat;
- e) Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi untuk kepentingan pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan;
- f) Mengembangkan diversifikasi pemanfaatan sumberdaya energi yang terbarukan guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

V.2. Sasaran Umum

Berkenaan dengan arah kebijaksanaan tersebut di atas, maka gambaran kinerja pencapaiannya dalam lima tahun ditetapkan sasaran umum yang akan dicapai sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI antara 95-98%;
2. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs antara 95-100%;
3. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA antara 65-75%;
4. Terselenggaranya sekolah-sekolah bertaraf internasional pada berbagai jenjang pendidikan;
5. Terwujudnya penerapan teknologi informasi pada sekolah-sekolah;
6. Berkembangnya kurikulum pendidikan dasar dan menengah berbasis sains dan teknologi;
7. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
8. Meningkatnya akses untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat;

9. Berkembangnya perilaku gemar membaca bagi seluruh lapisan masyarakat yang didukung dengan ketersediaan berbagai jenis buku-buku bacaan;
10. Meningkatnya kualitas kinerja dan kesejahteraan guru;
11. Menurunnya angka buta aksara dari 66.140 orang menjadi 33.070 orang;
12. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 312 menjadi kurang dari 226 per 100.000 kelahiran hidup ;
13. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 41 menjadi kurang dari 26 per 1.000 kelahiran hidup;
14. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 21,7% menjadi kurang dari 15%;
15. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) dari 69 tahun menjadi 71 tahun;
16. Meningkatnya cakupan bayi yang diberi ASI Eksklusif dari 78,08 % menjadi 90 %;
17. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dari 72,49% menjadi 90 %;
18. Menurunnya Usia Harapan Hidup (UHH) dari 69 tahun menjadi 71 tahun;
19. Meningkatnya jumlah dan kualitas pusat-pusat pelayanan kesehatan;
20. Meningkatnya akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
21. Meningkatnya mutu dan kinerja pelayanan rujukan di Rumah Sakit Provinsi dengan indikator utama rawat jalan 165.000 kunjungan/ tahun, rawat inap 15.200 kunjungan/tahun dan BOR menjadi 71,84%;
22. Meningkatkan fasilitas pelayanan rujukan rumah sakit yang memadai dengan pembangunan gedung baru di lokasi baru Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dengan kapasitas 500 tempat tidur;
23. Meningkatkan pelayanan RSUD Provinsi yang terakreditasi dari 5 pelayanan menjadi 17 pelayanan;
24. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri yang memungkinkan terselenggaranya proses politik;
25. Terciptanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga mampu menangkai segenap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang muncul dari dalam maupun dari luar;
26. Suksesnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;

27. Meningkatnya sinergi dan harmoni antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif daerah dengan semangat kemitraan yang sejajar dalam perumusan kebijakan daerah;
28. Terwujudnya reorganisasi, restrukturisasi dan revitalisasi organisasi pemerintahan daerah dalam kerangka reformasi birokrasi pemerintahan daerah;
29. Meningkatnya kualitas, disiplin, etos kerja dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah;
30. Mantapnya koordinasi dan pembinaan daerah-daerah otonom baru sebagai hasil dari upaya pemekaran wilayah;
31. Meningkatnya efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
32. Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan pemerintah daerah;
33. Terciptanya keadilan melalui penegakan supremasi hukum;
34. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
35. Meningkatnya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah;
36. Tersedianya perangkat teknologi informasi beserta efektifitas pemanfaatannya;
37. Meningkatnya ketersediaan data base pada semua bidang pembangunan daerah;
38. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
39. Meningkatnya cakupan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pembangunan daerah;
40. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta pengembangan potensi sektoral;
41. Terciptanya iklim investasi yang mampu membangkitkan gairah dan minat investasi;
42. Berkembangnya informasi bisnis dan promosi potensi pembangunan dan investasi;
43. Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang, minyak dan gas alam;
44. Meningkatnya usaha industri kecil dan tumbuhnya industri skala menengah dan besar;
45. Meningkatnya kelompok-kelompok usaha bersama masyarakat dalam wadah koperasi;
46. Meningkatnya jumlah, jenis dan omset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

47. Meningkatnya akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap sumber-sumber permodalan dengan tingkat bunga pinjaman yang sangat rendah;
48. Meningkatnya kualitas dan kapasitas tenaga kerja sehingga mampu terserap dalam pasar kerja;
49. Tertatanya kawasan permukiman transmigrasi sebagai sentra-sentra produksi dan meningkatnya taraf hidup transmigran;
50. Terjaganya keserasian dan kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas pembangunan daerah;
51. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan yang telah mengalami degradasi;
52. Meningkatnya produksi padi dari 350.000 ton pertahun menjadi 400.000 ton pertahun melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi;
53. Meningkatnya produksi jagung dari 75.000 ton pertahun menjadi 100.000 ton pertahun;
54. Meningkatnya produksi kacang kedelai dari 3.000 ton pertahun menjadi 6.000 ton pertahun;
55. Meningkatnya produksi kakao dari 125.000 ton pertahun menjadi 150.000 ton pertahun;
56. Meningkatnya produksi jambu mete dari 40.000 ton pertahun menjadi 75.000 ton pertahun;
57. Meningkatnya produksi cengkeh dari 1.700 ton pertahun menjadi 2.075 ton pertahun;
58. Meningkatnya produksi vanili dari 90 ton pertahun menjadi 150 ton pertahun;
59. Meningkatnya produksi lada dari 3.500 ton pertahun menjadi 5.000 ton pertahun;
60. Meningkatnya produksi kemiri dari 1.250 ton pertahun menjadi 2.000 ton pertahun;
61. Berkembangnya produksi kelapa sawit dan industri minyak sawit;
62. Berkembangnya produksi jarak pagar dan industri biodiesel;
63. Meningkatnya produksi sayur-sayuran;
64. Meningkatnya produksi buah-buahan;
65. Meningkatnya populasi ternak sapi dari 225.000 ekor menjadi 300.000 ekor;
66. Meningkatnya populasi ternak kambing dari 100.000 menjadi 200.000 ekor;
67. Meningkat populasi ayam dari 7.800.000 ekor menjadi 10.000.000 ekor;

68. Meningkatnya produksi telur unggas dari 5.750.000 kg pertahun menjadi 7.500.000 kg pertahun;
69. Meningkatnya produksi perikanan laut dari 200.834,1 ton pertahun menjadi 215.000 ton pertahun;
70. Meningkatnya produksi perikanan perairan umum dari 4.100 ton pertahun menjadi 5.000 ton pertahun;
71. Meningkatkan penataan, pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (KP3K)
72. Meningkatnya volume dan nilai ekspor dan perdagangan antar pulau hasil perikanan
73. Meningkatnya produksi perikanan budidaya pertahun:
 - budidaya laut: dari 97.317,5 ton pertahun menjadi 119.019,3 ton pertahun.
 - budidaya air payau: dari 11.317 ton pertahun menjadi 12.578,8 ton per tahun
 - budidaya air tawar: dari 911,1 ton pertahun menjadi 1.012,7 ton pertahun
74. Meningkatnya produksi hasil hutan dan berkembangnya hutan tanaman;
75. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara seiring dengan meningkatnya kualitas dan akses terhadap obyek-obyek wisata daerah;
76. Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya dan situs budaya daerah;
77. Meningkatnya keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial yang memperkuat hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan;
78. Meningkatnya pembinaan pemuda dan prestasi olah raga;
79. Meningkatnya fasilitas peribadatan dari segenap lapisan umat beragama;
80. Meningkatnya kapasitas spiritual masyarakat;
81. Meningkatnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun;
82. Meningkatnya intensitas pemberdayaan masyarakat dengan memposisikan kaum perempuan dalam kemitrasejajaran;
83. Meningkatnya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;

84. Meningkatnya kualitas pelayanan jalan dan jembatan yang mampu memberikan akses antar pusat-pusat pemerintahan dan antara sentra-sentra produksi dengan sentra-sentra pemasaran;
85. Meningkatnya kapasitas pelayanan Bandara Wolter Monginsidi sehingga dapat menjadi bandara transit dan sekaligus menjadi Bandara Embarkasi Haji;
86. Terwujudnya beberapa Bandara Kabupaten/Kota sehingga mampu mendukung peningkatan pelayanan transportasi udara bagi masyarakat setempat;
87. Meningkatnya kapasitas pelayanan pelabuhan sehingga mampu mendukung lalu lintas penumpang, barang maupun kargo;
88. Terciptanya keterpaduan antar moda transportasi;
89. Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi untuk kepentingan pertanian;
90. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih khususnya di wilayah pedesaan;
91. Berkembangnya cakupan jaringan telekomunikasi hingga ke pelosok wilayah pedesaan;
92. Tercapainya tingkat elektrifikasi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara minimal sebesar 50 %.
93. Berkembangnya diversifikasi pemanfaatan sumberdaya energi yang meliputi potensi tenaga air, tenaga angin, tenaga surya dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah pedesaan;
94. Tertatanya kawasan permukiman dan perumahan rakyat;
95. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang wilayah dan kawasan;
96. Mantapnya koordinasi, pencegahan dan penanggulangan bencana;
97. Menurunnya tingkat pengangguran dari 9,67% menjadi sekitar 7%;
98. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 8 sampai dengan 8,5%, yang bertumpu pada bidang pertanian, dengan dukungan bidang-bidang lain seperti pertambangan dan penggalian, bidang keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;
99. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dari Rp. 4,55 Juta pertahun menjadi 6,21 Juta pertahun;

100. Meningkatnya produktivitas daerah dalam upaya percepatan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah;
101. Menurunnya jumlah penduduk miskin sampai 10 % dari total jumlah penduduk miskin;
102. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menggambarkan tentang kondisi gabungan tiga komponen dasar yaitu derajat kesehatan, pendidikan dan pendapatan perkapita penduduk. Berdasarkan atas ketiga komponen tersebut sasaran yang hendak dicapai untuk meningkatkan indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tenggara sampai Tahun 2013 adalah ; meningkatnya usia harapan hidup dari 69 tahun menjadi 71 tahun, meningkatnya lama pendidikan dari 7,3 tahun menjadi 8 tahun serta meningkatnya pendapatan penduduk perkapita setara dengan UMR.
103. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

VI.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Melihat perkembangan pendapatan daerah dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2007 menunjukkan *trend* kenaikan. Walaupun tidak secara massif namun kenaikan tersebut cukup signifikan untuk membiayai program-program prioritas dalam pembangunan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2003 sebesar Rp.338,23 Milyar, kemudian pada tahun 2007 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.681,32 Milyar yang berarti meningkat rata-rata sekitar 25,37 % pertahun.

Tabel 15. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003 – 2007

Tahun	Pendapatan Daerah		
	Target (Rp)	Realisasi	
		(Rp)	(%)
2003	334.815.321.000	338.236.709.607	101,02
2004	370.903.000.000	361.354.740.364	97,43
2005	410.704.845.364	392.387.677.456	95,54
2006	604.260.720.106	598.368.955.501	99,02
2007	709.300.000.000	681.320.194.065	89,30

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sultra

Pendapatan Asli Daerah

Komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih bertumpu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama atas Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB). Peranan PKB, BBN-KB dan BBKB dalam Pajak Daerah pada tahun 2003 adalah sebesar 98,17 % dari jumlah Pajak Daerah dan pada tahun 2007 mencapai 98,46 %. Realisasi PKB, BBN-KB dan BBKB pada tahun 2003 adalah sebesar Rp. 53,00 Milyar dan pada tahun 2007 sebesar Rp. 83,04 Milyar atau terdapat kenaikan rata-rata sebesar 14,17 % pertahun. Sedangkan

peranannya berkisar antara 68,29 % hingga 71,17 % terhadap Pendapatan Asli Daerah. Diharapkan sampai dengan tahun 2013 kontribusi obyek pajak ini akan terus meningkat.

Harapan akan adanya peningkatan kontribusi PKB, BBN-KB dan BBKB tersebut di atas, nampaknya akan dapat direalisasikan mengingat jumlah kendaraan bermotor roda empat pada tahun 2007 sebanyak 15.178 unit dan jumlah kendaraan roda dua mencapai 118.922 unit dengan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor rata-rata sekitar 1,52 % pertahun. Melihat kondisi tersebut, maka pada tahun 2013 jumlah kendaraan roda empat diproyeksikan akan menjadi 16.562 unit dan kendaraan roda dua menjadi 129.768 unit.

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003 – 2007

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		
	Target (Rp)	Realisasi	
		(Rp)	(%)
2003	75.145.990.000	76.479.893.235	101,78
2004	102.300.000.000	91.543.232.258	89,49
2005	122.763.845.364	101.079.223.318	82,34
2006	136.664.700.000	120.632.753.562	88,27
2007	174.860.000.000	121.594.493.181 *	69,54

* : Angka Sementara

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sultra

Pada lima tahun mendatang dari tahun 2008 sampai dengan 2013 perkembangan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan PAD rata-rata sebesar 15 % per tahun dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7,5 % per tahun. Melalui upaya peningkatan PAD (berdasarkan asumsi dan proyeksi di atas) maka pada tahun 2013 diharapkan rasio PAD Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap PDRB akan mencapai 1,5 %. Angka proyeksi ini mendekati nilai rasio pada kapasitas fiskal di negara-negara berkembang yaitu antara 1,5 – 2,0%.

Disamping itu potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah lainnya juga akan diintensifkan pengelolaannya seperti kontribusi dan pengusaha eksploitasi sumberdaya alam (pertambangan, perikanan, kelautan dan lainnya) yang diharapkan pada gilirannya nanti juga akan turut menopang penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dana Perimbangan

Realisasi menunjukkan bahwa dana perimbangan berperan sangat dominan dalam struktur pendapatan daerah. Selama lima tahun terakhir ini kontribusi dana perimbangan bergerak meningkat antara 70,97% - 79,84%. Pada tahun 2007 jumlah dana perimbangan mencapai Rp.511,81 Milyar atau sekitar 2,85 % dari proyeksi PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007.

Tabel 17. Realisasi Dana Perimbangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003 – 2007

Tahun	Dana Perimbangan		
	Target (Rp)	Realisasi	
		(Rp)	(%)
2003	251.420.000.000,00	253.507.935.372,00	100,83
2004	255.259.000.000,00	256.467.508.105,57	100,47
2005	280.557.000.000,00	283.924.454.138,00	101,20
2006	467.596.020.106,00	477.736.201.949,00	102,17
2007	516.641.000.000,00	525.121.640.943,00	101,64

Sumber

: Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sultra

Dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2007 peran dana perimbangan pada pendapatan daerah rata-rata sekitar 74,41 % dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2007 jumlah dana perimbangan mencapai Rp. 511,81 Milyar atau sekitar 73,96 % dari total pendapatan daerah dan besaran dana perimbangan diharapkan meningkat rata-rata sebesar Rp. 25 Milyar pertahun karena diproyeksikan pertumbuhan rata-rata hanya sekitar 5 % pertahun. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kewajiban Pemerintah Pusat untuk menyediakan Dana Alokasi Umum setinggi-tingginya 26% dari penerimaan netto telah dipenuhi sejak tahun 2007.

VI.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Bedasarkan sudut pandang anggaran, arah pengelolaan belanja daerah ditujukan pada meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui prinsip anggaran berbasis kinerja.

Namun arah pengelolaan belanja daerah tidak saja berpatokan pada asumsi-asumsi normatif di atas karena Kepala Daerah memegang kendali terhadap totalitas pengelolaan anggaran. Disisi lain, Kepala Daerah juga memiliki visi, misi dan program-program prioritas beserta serangkaian sasaran atau target-target pembangunan yang perlu diwadahi dalam format belanja APBD. Untuk itu maka arah pengelolaan belanja (khususnya belanja langsung) harus memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara makro, format belanja daerah diintrodusir melalui 2 (dua) kerangka umum yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Masing-masing memiliki rincian belanja tersendiri. Perkembangan lima tahun terakhir, proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mendekati rasio antara 40 % : 60 %. Rasio ini akan ditingkatkan efektifitasnya sehingga dapat memberikan manfaat terhadap upaya percepatan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, Hibah dan Subsidi. Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dari jumlah belanja tidak langsung yang mencapai Rp. 187,26 Milyar atau 65,08 % dari jumlah Belanja Tidak Langsung. Selanjutnya, komponen belanja tidak langsung lainnya adalah belanja-belanja yang tidak memberikan prestasi kerja langsung. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota besarnya akan seiring dengan besarnya peningkatan penerimaan pajak daerah.

Arah kebijakan pemberian bantuan keuangan difokuskan pada Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan se-Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 100 Juta per-Desa/Kelurahan pertahun. Sedangkan untuk pemberian bantuan sosial diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang cakupannya relatif terbatas.

Belanja Langsung

Belanja Langsung diharapkan mampu mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang diwujudkan melalui program-program prioritas pembangunan daerah. Beberapa program-program prioritas diarahkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mengurangi tingkat pengangguran,

meningkatkan angka partisipasi murni untuk tingkat pendidikan dasar, menengah dan atas, meningkatkan sistem jaringan pelayanan kesehatan, meningkatkan produksi sektor pertanian dalam arti luas dan lain- lain sampai dengan tahun 2013.

Belanja Urusan Wajib

Belanja Urusan Wajib ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Belanja Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pengembangan ekonomi masyarakat dan penataan birokrasi. Kesemuanya itu terdistribusi ke dalam 25 urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 18. Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007

NO	Jenis	Proporsi	
		Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
	Urusan Wajib		
1	Pendidikan	6,5	7,0
2	Kesehatan	6,0	7,0
3	Pekerjaan Umum	17,0	17,5
4	Perumahan Rakyat	0,1	0,1
5	Penataan Ruang	0,1	0,1
6	Perencanaan Pembangunan	1,7	1,9
7	Perhubungan	5,0	5,5
8	Lingkungan Hidup	0,5	0,7
9	Pertanahan	0,1	0,1
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	0,1	0,1
11	Pemberdayaan Perempuan	0,1	0,1
12	KB dan Keluarga Sejahtera	0,1	0,1
13	Sosial	0,9	1,0
14	Tenaga Kerja	2,0	2,5
15	Koperasi dan UKM	1,0	1,5
16	Penanaman Modal	0,1	0,1
17	Kebudayaan	0,1	0,1
18	Pemuda dan Olah Raga	0,1	0,1
19	Kesbang dan Politik Dalam Negeri	0,8	1,0
20	Pemerintahan Umum	34,4	39,5
21	Kepegawaian	1,8	2,0
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,8	1,0
23	Statistik	0,1	0,1
24	Arsip	0,4	0,5
25	Komunikasi dan Informatika	0,3	0,4

	Jumlah	80	90
	Urusan Pilihan		
1	Pertanian	4,3	6,0
2	Kehutanan	1,1	3,0
3	Energi dan Sumber Daya Mineral	1,0	2,5
4	Pariwisata	0,5	1,5
5	Kelautan dan Perikanan	2,1	3,5
6	Perindustrian dan Perdagangan	1,0	2,5
7	Transmigrasi	0,1	1,0
	Jumlah	10	20

Sumber : Bappeda Prov. Sultra

Arah Kebijakan Belanja Urusan Wajib tahun 2008 – 2013 adalah sebagai berikut :

1. Proporsi Belanja Urusan Wajib akan dipertahankan pada interval 80 – 90% hingga tahun 2013.
2. Batas bawah pengalokasian anggaran untuk setiap urusan pemerintah diupayakan mencapai 1% pada tahun 2013. Hal ini berdasarkan pertimbangan urgensi dan kebutuhan program pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat.
3. Batas atas pengalokasian anggaran untuk setiap urusan pemerintah tidak lebih rendah dari 1,5% pada tahun 2013 bagi urusan pemerintah yang belum mencapai jumlah tersebut pada tahun dasar. Hal ini juga memperhatikan urgensi program yang menyentuh pelayanan dasar masyarakat.
4. Urusan pemerintah yang akan diupayakan untuk ditingkatkan batas atasnya hingga tahun 2013 meliputi :
 - a. Pendidikan, hingga mencapai 20 %.
 - b. Kesehatan, hingga mencapai 10 %.
 - c. Perindustrian dan Perdagangan, hingga mencapai 5 %.
 - d. Tenaga Kerja, hingga mencapai 5 %.
 - e. Koperasi dan UKM, hingga mencapai 5 %.
5. Urusan pemerintah yang disesuaikan kemampuan anggaran serta urgensi urusan tersebut bagi pelayanan masyarakat akan dikurangi hingga tahun 2013 meliputi :
 - a. Pekerjaan Umum, hingga mencapai 10 %.
 - b. Pemerintahan Umum, hingga mencapai 35 %.

Belanja Urusan Pilihan

Belanja urusan pilihan adalah belanja yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah yang diprioritaskan pada terciptanya keunggulan komparatif daerah.

Proporsi Belanja Urusan Pilihan tahun 2008-2013 adalah antar 10% - 20% yang akan dipertahankan dalam skala yang proporsional sampai dengan tahun 2013.

Arah kebijakan Belanja Urusan Pilihan pada tahun 2008 – 2012 adalah sebagai berikut :

1. Pertanian mencapai 6 %.
2. Kehutanan mencapai 3 %.
3. Energi dan Sumberdaya Mineral mencapai 5 %.
4. Urusan Kelautan dan Perikanan mencapai 3,5 %.
5. Perindustrian dan Perdagangan mencapai 2,5 %.
6. Pariwisata mencapai 1 %.

1.3. Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan Daerah dicerminkan atas jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lainnya. Sedangkan Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan Belanja Tidak Langsung dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin atau dengan kata lain merupakan rasio antara Belanja Langsung dibagi dengan jumlah penduduk miskin.

Tabel 19. Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003 - 2007.

7	Keterangan	2003		2004		2005		2006		2007	
		Rp.	% PDRB	Rp.	% PDRB	Rp.	% PDRB	Rp.	% PDRB	Rp.	% PDRB
1	APBD (Rp.Milyar)										
	PENDAPATAN										
	PAD	75,15	0,84	102,30	1,00	122,76	0,95	136,66	0,89	174,86	0,99
	Dana Perimbangan	251,42	2,82	255,26	2,49	280,56	2,16	467,60	3,06	516,64	2,93
	Lain-Lain	11,25	0,13	13,34	0,13	7,38	0,06	-	-	17,80	0,10
	Sub Jumlah	337,82	3,79	370,90	3,61	410,70	3,16	604,26	3,96	709,30	4,03
	BELANJA										
	Belanja Tidak Langsung	175,62	1,97	199,65	1,94	239,88	1,85	299,71	1,96	287,75	1,63
	Belanja Langsung	194,20	2,18	190,20	1,85	187,79	1,45	329,63	2,16	471,31	2,68
	Sub Jumlah	369,82	4,15	389,85	3,80	427,68	3,29	629,34	4,12	759,06	4,31
	SURPLUS/(DEFISIT)	(32,00)	(0,36)	(18,94)	(0,18)	(16,97)	(0,13)	(25,08)	(0,16)	(49,76)	(0,28)
	PEMBIAYAAN										
	Penerimaan Pembiayaan	33,26	0,37	19,94	0,19	16,97	0,15	37,07	0,24	62,76	0,36
	Pengeluaran Pembiayaan	1,26	0,01	1,00	0,01	2,00	0,02	11,99	0,08	13,00	0,07
	JUMLAH PEMBIAYAAN	32,00	0,36	18,94	0,18	16,97	0,13	25,08	0,16	49,76	0,28
2	ASUMSI DASAR KEUANGAN										
	PDRB ADHB (Rp.Milyar)	8.908,78		10.267,96		12.981,05		15.270,35		17.613,14	
	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.919.273		1.911.203		1.960.697		2.001.818		2.117.456	
	Penduduk Miskin (jiwa)	428.200		418.400		450.460		428.190		465.440	
	% Penduduk Miskin	22,84		21,89		21,45		21,39		21,33	
	Kapasitas Fiskal (Rp)	453.526		454.589		416.885		769.822		1.012.612	

Sumber: Bappeda Prov. Sultra

Dalam RPJMD ini, kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel. 20. Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 - 2013.

No	Keterangan	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
		Rp.	% PDRB	Rp.	% PDRB	Rp.	% PDRB	Rp.	% PDRB	Rp.	% PDRB	Rp.	% PDRB
1	APBD (Rp.Milyar)												
	PENDAPATAN												
	PAD	219,69	1,09	220,10	0,95	251,29	0,94	286,90	0,93	327,55	0,93	373,96	0,92
	Dana Perimbangan	665,60	3,30	698,88	3,01	733,82	2,75	770,52	2,51	809,04	2,29	849,49	2,09
	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	885,29	4,38	918,98	3,96	985,11	3,69	1.057,41	3,44	1.136,59	3,22	1.223,46	3,01
	BELANJA												
	Belanja Tidak Langsung	640,10		590,00		600,00		610,00		620,00		630,00	
	Belanja Langsung	243,60		318,98		375,11		437,41		506,59		583,46	
	Sub Jumlah	883,70	4,38	908,98	3,91	975,11	3,65	1.047,41	3,41	1.126,59	3,19	1.213,46	2,99
	SURPLUS/(DEFISIT)	1,59	0,01	10,00	0,04	10,00	0,04	10,00	0,03	10,00	0,03	10,00	0,02
	PEMBIAYAAN												
	Penerimaan Pembiayaan	10,71		-		-		-		-		-	
	Pengeluaran Pembiayaan	12,30		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(1,59)	(0,01)	(10,00)	(0,04)	(10,00)	(0,04)	(10,00)	(0,03)	(10,00)	(0,03)	(10,00)	(0,02)
2	ASUMSI DASAR KEUANGAN												
	PDRB ADHB (Rp.Milyar)	20.195,04		23.224,29		26.707,93		30.714,12		35.321,24		40.619,43	
	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.159.806		2.203.002		2.247.062		2.292.004		2.337.844		2.384.600	
	Penduduk Miskin (jiwa)	427.610		389.780		351.950		314.120		276.290		238.460	
	% Penduduk Miskin	19,80		17,69		15,66		13,71		11,82		10,00	
	Kapasitas Fiskal (Rp)	569.678		818.359		1.065.811		1.392.496		1.833.544		2.446.764	

Sumber: Bappeda Prov. Sultra

Atas dasar kebijakan awal tersebut di atas maka dalam jangka menengah lima tahunan (2008 – 2013) kebijakan umum anggaran diarahkan pada :

1. Meningkatkan PAD sehingga mampu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan rasio terhadap PDRB ADH mencapai 0,92 % pada tahun 2013.
2. Meningkatkan PAD dengan menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah serta rasa memiliki pajak daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan meminimalkan tunggakan pajak yang masih tersisa.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja sehingga diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 10% pada tahun 2013.
4. Mengembangkan rasio antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung dalam perbandingan yang lebih proporsional.
5. Mengembangkan rasio antara belanja wajib dengan belanja pilihan sekitar 80 : 20 pada tahun 2013.
6. Belanja wajib diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan dan oleh karena itu proporsi untuk urusan pendidikan diupayakan mencapai 20% dan urusan kesehatan mencapai 7 % pada tahun 2013.
7. Mempertajam prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah daerah sesuai dengan sasaran-sasaran beserta indikator-indikator keberhasilannya sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD ini.
8. Meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dasar sehingga mampu memicu laju pertumbuhan ekonomi wilayah dan interaksi sosial budaya masyarakat.
9. Mengutamakan alokasi anggaran yang mendorong terbangunnya keunggulan daya saing daerah serta memperkokoh landasan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor unggulan.
10. Meningkatkan kapasitas keuangan Pemerintah Desa/Kelurahan melalui pemberian keuangan sebesar Rp. 100 Juta per-Desa/Kelurahan pertahun.

BAB VII
AGENDA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

VII.1. FUNGSI PENDIDIKAN

A. Pendidikan

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

- a) Masih perlunya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan belum optimalnya pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
- c) Belum tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- d) Masih rendahnya mutu pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah;
- e) Masih tingginya angka buta aksara;
- f) Terbatasnya sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi pada sekolah luar biasa/ pendidikan khusus;
- g) Masih rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- h) Masih rendahnya budaya baca siswa/masyarakat dan belum maksimalnya pembinaan perpustakaan;
- i) Masih rendahnya manajemen pelayanan pendidikan yang profesional;
- j) Melemahnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya daerah.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;;
- c) Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan penancangan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun;;
- d) Peningkatan kualitas pendidikan, baik pendidikan umum, pendidikan kejuruan maupun pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;

- e) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat;
- f) Peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pendidik pada sekolah luar biasa/ pendidikan layanan khusus.
- g) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidik dan tenaga kependidikan yang responsif gender;
- h) Peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
- i) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan pelayanan pendidikan yang profesional dan responsif gender;
- j) Pengembangan dan pelestarian aset seni dan budaya Sulawesi Tenggara sebagai bagian integral dari khasanah kebudayaan Indonesia ;

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
- c) Tercapainya target ketuntasan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dengan indikator APM SD/MI 95 % dan APK SMP/MTs 95 % pada tahun 2009, dan pencanangan wajib belajar pendidikan 12 tahun pada tahun 2010;
- d) Meningkatnya mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui peningkatan nilai rata-rata standar kelulusan siswa dari 5,25 pada tahun 2008 menjadi 6,50 pada tahun 2013;
- e) Menurunnya angka buta aksara melalui peningkatan daya serap dari 3,12 % (66.140 jiwa) pada tahun 2007 menjadi 0,5 % pada tahun 2013;
- f) Meningkatnya jumlah sekolah standar nasional menjadi sekolah bertaraf internasional, pada setiap jenjang pendidikan;
- g) Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan, baik pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal
- h) Meningkatnya budaya baca siswa/ masyarakat dan maksimalnya pembinaan perpustakaan;
- i) Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan yang profesional;
- j) Meningkatnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya daerah.

4. Program dan Kegiatan

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (5) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
- (6) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (9) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- (10) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- (11) Program Pendidikan Menengah;
- (12) Program Pendidikan Nonformal;
- (13) Program Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- (14) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- (15) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
- (16) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- (17) Program Pengembangan Nilai Budaya;
- (18) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- (19) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
- (20) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

- (3) Program Pendidikan Menengah yang meliputi kegiatan :
- (4) Program Pendidikan Nonformal;
- (5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- (6) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
- (7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- (8) Koordinasi, Penyusunan Bahan Kebijakan Pimpinan Departemen.

B. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Permasalahan

- a) Masih perlunya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan belum optimalnya pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Rendahnya peran dan kualitas pemuda dalam pembangunan daerah;
- c) Menurunnya daya saing para atlet olah raga, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional;
- d) Masih kurangnya sarana dan prasarana pemuda dan olah raga;
- e) Masih rendahnya manajemen pelayanan pemuda dan olah raga yang profesional.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan peran dan kualitas pemuda dalam pembangunan daerah baik laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan daerah;
- c) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga guna mendorong peningkatan prestasi olah raga;
- d) Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga;
- e) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik bidang pemuda dan olah raga.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Meningkatnya peran dan kualitas pemuda dalam pembangunan daerah;
- c) Meningkatnya daya saing atlet olah raga daerah dan tersedianya sarana dan prasarana olahraga daerah;
- d) Tersedianya sarana dan prasarana pemuda dan olah raga;
- e) Meningkatnya manajemen pelayanan pemuda dan olah raga.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- (4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (5) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
- (6) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (9) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
- (10) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan ;
- (11) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda ;
- (12) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;
- (13) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
- (14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan Olah Raga;
- (15) Program manajemen pelayanan pemuda dan olah raga;

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda;
- (2) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan;
- (3) Program Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda;
- (4) Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga;
- (5) Program Pembinaan Dan Pemasayarakatan Olah Raga;
- (6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- (7) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak.

C. Perpustakaan Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Perpustakaan adalah sebagai berikut :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Masih rendahnya budaya baca dan belum maksimalnya pembinaan perpustakaan;
- c) Masih terbatasnya SDM bidang Perpustakaan;
- d) Masih terbatasnya daya tampung gedung perpustakaan;
- e) Jumlah dan keragaman koleksi belum sesuai kebutuhan masyarakat;
- f) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
- c) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang perpustakaan;
- d) Peningkatan kapasitas / daya tampung gedung perpustakaan;
- e) Peningkatan Koleksi perpustakaan;
- f) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan;

- g) Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan;
- h) Peningkatan Profesionalisme pustakawan;
- i) Pengembangan perpustakaan digital dan otomasi perpustakaan.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Meningkatnya budaya baca dan maksimalnya pembinaan perpustakaan;
- c) Terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM bidang perpustakaan;
- d) Meningkatnya daya tampung gedung perpustakaan;
- e) Terpenuhinya jumlah dan keragaman koleksi bahan pustaka;
- f) Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan;
- g) Terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan termasuk pendukung perpustakaan digital dan otomasi perpustakaan;
- h) Meningkatnya kualitas layanan Perpustakaan;
- i) Berkembangnya perpustakaan digital dan otomasi perpustakaan;

4. Program

a) Sumber dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai ;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- (4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (5) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (8) Program Pengelolaan SDM untuk aparatur;
- (9) Program Pengelolaan SDM;
- (10) Program Pemasayarakatan Jabatan Fungsional Pustakawan;

- (11) Program Publikasi dan Sosialisasi minat dan Budaya Baca;
- (12) Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- (13) Program Pustaka Perpustakaan Umum dan Daerah;
- (14) Program Peningkatan sarana dan prasarana;
- (15) Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan; perpustakaan;
- (16) Program Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah;
- (17) Program Perencanaan dan penyusunan Budaya Baca;
- (18) Program Pengelolaan kekayaan budaya;
- (19) Program Pengelolaan Karya Cetak dan Karya rekam;
- (20) Program Pengembangan Minat dan Budaya membaca;
- (21) Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- (2) Program Pengembangan Nilai Budaya;
- (3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- (4) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
- (5) Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;
- (6) Program Penerapan Pemerintahan yang baik.

D. Pendidikan dan Pelatihan

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

- a) Terbatasnya kapasitas dan efektifitas dalam pemberian layanan administrasi perkantoran;
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana, peralatan serta fasilitas perkantoran/kediklatan;

- c) Terbatasnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d) Terbatasnya data dan informasi yang dapat digunakan untuk menjadi dasar dalam peningkatan dan pengembangan program-program kediklatan bagi aparatur.

2. Kebijakan Umum

- a) Optimalisasi pengelolaan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Optimalisasi pemanfaatan dan pengadaan sarana dan prasarana, peralatan serta fasilitas perkantoran/kediklatan;
- c) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia apratur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d) Percepatan perolehan Database kediklatan yang komprehensif dan relevan.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi yang efektif;
- b) Lancar dan efektifnya pemberian layanan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan diklat aparatur;
- c) Meningkatnya kinerja Aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Meningkatnya program-program kediklatan yang dihasilkan berdasarkan atas kebutuhan riil.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja ;
- (4) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- (6) Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- (7) Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengelola, dan Penyelenggara Diklat Aparatur ;
- (8) Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Widyaiswara/Pengajar/Pelatih dalam Pengajaran Diklat Aparatur;
- (9) Program Pengkajian dan pengembangan kediklatan.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Program Pengkajian dan Pengembangan Kediklatan.

c) Sumber Dana Bantuan Luar Negeri :

- (1) Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Program Peningkatan dan Kompetensi Pengelola dan Penyelenggara Diklat Aparatur.

E. Kepegawaian Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Kurang optimalnya pengolahan sumber daya manusia;
- c) Rendahnya kapasitas sumber daya aparatur;
- d) Kurangnya pembinaan dan pengembangan aparatur.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Pengoptimalan pengelolaan SDM khususnya PNS baik kualitas maupun kuantitas;
- c) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;

- d) Peningkatan pembinaan dan pengembangan SDM aparatur.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Optimalisasi pengelolaan SDM aparatur
- c) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur;
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (7) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

M2. FUNGSI KESEHATAN

A. Kesehatan

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Masih rendahnya akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin baik yang berada di daerah perkotaan maupun daerah terpencil;
- c) Masih tingginya angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI);

- d) Masih tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, serta ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK);
- e) Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular maupun tidak menular;
- f) Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman, kualitas air yang belum memenuhi syarat kesehatan, serta masih tingginya vektor penyebab penyakit;
- g) Masih rendahnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
- h) Rendahnya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin;
- i) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);
- j) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah padahal kasus semakin bertambah;
- k) Belum adanya program terpadu Model Kelompok Bina Keluarga (KBK), Posyandu dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
- l) Masih lemahnya Manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu baik di daerah perkotaan maupun di daerah terpencil melalui program upaya kesehatan berbasis perorangan;
- c) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar melalui program pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan upaya kesehatan berbasis masyarakat ;
- d) Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit melalui penambahan kapasitas tempat tidur dan peralatan medis dan non medis serta penyediaan pelayanan yang terakreditasi;
- e) Peningkatan status gizi masyarakat melalui upaya menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, KEK Bumil serta pengembangan peran serta masyarakat dalam gerakan keluarga sadar gizi;

- f) Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit melalui peningkatan kualitas pelayanan pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- g) Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan air bersih melalui pengembangan kemitraan dengan lintas sektor, swasta dan masyarakat luas dalam gerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
- h) Meningkatkan perilaku hidup sehat melalui pengembangan Desa Siaga;
- i) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan melalui standarisasi pelayanan kesehatan serta sertifikasi sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan;
- j) Meningkatkan jangkauan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin melalui program P2TP2A;
- k) Peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam pelayanan KB dan KR melalui P2TP2A;
- l) Pembentukan kesadaran politik pemerintah untuk mensupport program KRR melalui pendidikan formal dan pendidikan keluarga;
- m) Pengembangan model Operasional KBK-Posyandu-PAUD melalui pelaksanaan program perlindungan Anak;
- n) Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan melalui pengkajian dan penyusunan kebijakan, pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran dan penyempurnaan administrasi keuangan kesehatan dan pengembangan sistem informasi kesehatan.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Meningkat cakupan kunjungan ibu hamil (K4) menjadi 95% serta cakupan ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk menjadi 100%;
- c) Meningkatkan cakupan kunjungan neonatus dan bayi menjadi 90% serta seluruh bayi dengan berat badan lahir rendah mendapat pelayanan kesehatan;;
- d) Meningkatkan akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hami dan neonatus mencapai 80%; .

- e) Menurunkan prevalensi GAKY, dengan kriteria endemis sedang dari 24,9% menjadi 20,6%, dan endemis ringan dari 10,9% menjadi 5,0%
- f) Menurunkan prevalensi anemi bumil menurun dari 56,5% menjadi 40,1%;
- g) Menurunkan prevalensi Xerophthalmia turun dari 0,35 % menjadi kurang dari 0,05%,
- h) Meningkatkan cakupan Keluarga Mandiri Sadar Gizi sebesar 60%,
- i) Meningkatkan cakupan Universal Children Immunization (UCI) desa menjadi 100%;
- j) Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) rate: ≥ 2 per 100.000 anak usia kurang dari 15 tahun.
- k) Angka CDR penyakit TB: 70% dan angka keberhasilan pengobatan TB diatas 85%.
- l) Meningkatkan cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani menjadi 100%;
- m) Meningkatkan cakupan pelayanan penderita DBD menjadi 80%;
- n) Meningkatkan cakupan Balita dengan diare yang ditangani menjadi 100%;
- o) Meningkatkan cakupan rumah/ bangunan bebas jentik nyamuk aedes menjadi cakupan 95%;
- p) Meningkatkan cakupan penderita malaria yang diobati menjadi 100%;
- q) Menurunkan angka prevalensi Frambusia menjadi $\leq 1/100.000$ penduduk;
- r) Meningkatkan cakupan penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) menjadi lebih dari 90%;
- s) Meningkatkan cakupan pemberian vaksi anti rabies (VAR) menjadi 100%;
- t) Meningkatkan cakupan kasus filiaris yang ditangani menjadi lebih dari 90%;
- u) Meningkatkan monitoring kualitas air bersih di 85% desa yang ada;
- v) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan lingkungan dan sanitasi TTU dan TPM menjadi 80% serta presentasi keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan mencapai 80%.
- w) Meningkatkan Persentasi Posyandu Mandiri menjadi 40%.
- x) Terselenggaranya Penataan Manajemen Kesehatan, tersedianya dokumen RPJMD, Rensta, Renja dan evaluasi (Lakip dan Profil) Pembangunan Bidang Kesehatan Prov Sultra 2008 – 2013.;

- y) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB dan KR serta terbentuknya model operasional KBK-Posyandu-PAUD;
- z) Meningkatnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap KRR dan menurunnya kasus KRR;

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
- (7) Program Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan bebas biaya dan bermutu
- (8) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- (9) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- (10) Program Upaya Kesehatan Reproduksi
- (11) Program Upaya Kesehatan Anak
- (12) Program Peningkatan Kesehatan Kerja
- (13) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- (14) Program Penanggulangan Krisis dan Bencana Kesehatan
- (15) Program Pengembangan Pelayanan PONEK di Pusat Pelayanan Kesehatan
- (16) Program Pengembangan Pelayanan PONEK di Rumah Sakit Kabupaten/Kota;
- (17) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RS di Kabupaten/ Kota;
- (18) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Type B Pendidikan;
- (19) Program Peningkatan Gizi Masyarakat;
- (20) Program Peningkatan Gizi Institusi;

- (21) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- (22) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (23) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- (24) Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan;
- (25) Program Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan;
- (26) Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Fungsional Kesehatan;
- (27) Program Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan;
- (28) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan;
- (29) Program Kajian dan Kebijakan Kesehatan;
- (30) Program Peningkatan Administrasi Keuangan dan Hukum Kesehatan;
- (31) Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi;
- (32) Program Peningkatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat;
- (33) Program Pengembangan Penelitian Kesehatan;
- (34) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
- (35) Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- (36) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- (37) Program Penyediaan Pelayanan KB bagi Masyarakat Miskin
- (38) Program Pelayanan Alat Kontrasepsi
- (39) Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB dan KR
- (40) Program Perumusan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja
- (41) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- (42) Program Promosi KRR
- (43) Program Pengkajian pengembangan model Operasional KBK-Posyandu-Padu

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- (2) Program Upaya Kesehatan Perorangan;
- (3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- (4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- (5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- (6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- (7) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (8) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;
- (9) Program Sumber Daya Kesehatan;
- (10) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

B. Rumah Sakit Umum Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Belum optimalnya upaya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan terbatasnya tenaga medis dan para medis, sarana dan prasarana medis serta pelayanan Rumah Sakit sesuai standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Pengembangan fasilitas dan pemerataan layanan kesehatan melalui pengadaan, peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, peningkatan profesionalisme dan kemampuan teknis fungsional, kemitraan pelayanan kesehatan dan standarisasi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Terwujudnya akreditasi RSUD Provinsi dari Kelas B Non Pendidikan menjadi Kelas B Pendidikan;
- c) Meningkatnya mutu dan kinerja RSUD Provinsi dengan indikator utama adalah rawat jalan 165.000/tahun, rawat inap 15.200/tahun dan BOR 71,84 %;
- d) Meningkatnya profesionalisme tenaga medis dan paramedis melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional sesuai standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (5) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
- (6) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Tahunan;
- (9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- (10) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- (11) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- (12) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Realokasi RSUD);*
- (13) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
- (14) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Upaya Kesehatan Perorangan.

C. Rumah Sakit Jiwa

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa adalah sebagai berikut :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Belum memadainya sarana dan prasarana sehingga pelayanan dan kinerja rumah sakit belum optimal.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Pengembangan fasilitas dan pemerataan pelayanan melalui pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Terwujudnya pelayanan Rumah Sakit yang berkualitas, profesional dan akuntabel;
- c) Menurunnya stigma kesehatan jiwa di masyarakat;
- d) Meningkatnya sarana dan prasarana bagian / unit pelayanan Rumah Sakit.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (7) Program Peningkatan Kemitraan Dalam Pelayanan Kesehatan;
- (8) Program Upaya Kesehatan Masyarakat ;
- (9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- (10) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit ;
- (11) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Upaya Kesehatan Perorangan;

VII.3. FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL

A. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yaitu :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Lemahnya dukungan pemerintah untuk kesejahteraan perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) Rendahnya kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak;
- d) Belum terbentuknya komisi perlindungan anak di daerah;
- e) Masih rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran para pejabat dan masyarakat tentang PUG;
- f) Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga;

- g) Belum tersedianya data terpilah menurut tema dan jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemu kenali masalah- masalah gender yang ada;
- h) Penganggaran di setiap sektor belum responsif gender;
- i) Kurangnya komposisi perempuan dalam pengambilan keputusan;
- j) Kurangnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif;
- k) Kurangnya keterampilan perempuan dalam pengolahan hasil;
- l) Lemahnya dukungan pemerintah pada proses pelaksanaan PUG di tingkat Provinsi dan Kab./Kota;
- m) Rendahnya dukungan politik/komitmen tentang PUG;
- n) Belum adanya Perda untuk mempercepat pelaksanaan PUG;
- o) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penundaan usia perkawinan dan masalah kesehatan reproduksi remaja;
- p) Kurangnya kesadaran politik perempuan;
- q) Kurangnya produktifitas ekonomi perempuan;
- r) Rendahnya kapasitas sumberdaya pengelola PUG;
- s) Kurangnya lembaga sosial masyarakat bidang Perempuan dan Anak;
- t) Kurangnya pelayanan KB bagi masyarakat Miskin;
- u) Kurangnya peran serta masyarakat dalam kesehatan reproduksi;
- v) Kurang berkembangnya kesehatan reproduksi remaja;
- w) Kurangnya promosi kesehatan Ibu dan Anak;
- x) Kurangnya pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A);
- y) Kurangnya Penanggulangan Penyakit Menular Seksual HIV/AIDS dan Nafza di Sekolah, Karang Taruna dan Pesantren;
- z) Kurangnya Tenaga Pendamping Bina Keluarga;
- ā) Kurangnya Pemahaman Model Operasional Pengembangan KB dan PAUD.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Pembentukan P2TP2A dan KPAID untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan remaja serta perlindungan anak;
- c) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peran perempuan dan perlindungan anak Peningkatan advokasi pembentukan KPAID melalui eksekutif, legislatif dan lembaga pemerhati anak;
- d) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran para pejabat dan masyarakat tentang pentingnya PUG dalam pembangunan;
- e) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anggota rumah tangga melalui forum KDRT;
- f) Peningkatan ketersediaan data terpilah pada setiap SKPD;
- g) Peningkatan penganggaran pembangunan yang responsif gender;
- h) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan;
- i) Peningkatan 30 % quota perempuan di lembaga legislatif melalui komitmen politik;
- j) Peningkatan keterampilan perempuan dalam hal pengolahan hasil melalui P2WKSS;
- k) Perkuatan kinerja pemerintah terhadap proses pelaksanaan PUG dan Anak;
- l) Penggalangan dukungan politik melalui kerjasama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif;
- m) Pembentukan Perda untuk mempercepat pelaksanaan strategi PUG melalui diskusi-diskusi dengan pihak terkait;
- n) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penundaan usia perkawinan dan masalah kesehatan reproduksi remaja;
- o) Peningkatan kesadaran politik perempuan;
- p) Peningkatan produktifitas ekonomi perempuan;
- q) Peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola PUG;
- r) Peningkatan kualitas LSM Bidang Perempuan dan Anak;
- s) Peningkatan pelayanan KB bagi masyarakat miskin;

- t) Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesehatan reproduksi;
- u) Pengembangan kesehatan reproduksi remaja;
- v) Pengembangan promosi KIA;
- w) Peningkatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A);
- x) Peningkatan Penanggulangan Penyakit;
- y) Menular Seksual HIV/AIDS dan Nafza di Sekolah, Karang Taruna dan Pesantren;
- z) Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga;
- a) Pengkajian Model Operasional Pengembangan KB dan PAUD.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Meningkatnya dukungan pemerintah untuk kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak;
- d) Terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID);
- e) Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran para pejabat dan masyarakat tentang penting PUG;
- f) Menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga;
- g) Tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin pada semua SKPD;
- h) Terwujudnya penganggaran yang responsif gender;
- i) Meningkatnya keterampilan perempuan sehingga intensitas pemberdayaan;
- j) masyarakat dengan memposisikan kaum perempuan dalam kemitra seajar;
- k) Meningkatnya komitmen partai politik tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif;
- l) Terwujudnya keterampilan perempuan dalam pengolahan hasil;
- m) Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan PUG dan anak;
- n) Meningkatnya dukungan politik/komitmen tentang PUG;
- o) Terwujudnya Perda PUG;

- p) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penundaan usia perkawinan dan masalah kesehatan reproduksi remaja ;
- q) Meningkatnya kesadaran politik perempuan;
- r) Meningkatnya produktivitas ekonomi perempuan;
- s) Meningkatnya kapasitas sumberdaya pengelola PUG;
- t) Terbentuknya lembaga sosial masyarakat bidang Perempuan dan Anak;
- u) Terlaksananya pelayanan KB bagi masyarakat miskin;
- v) Terlaksananya peran serta masyarakat dalam kesehatan reproduksi;
- w) Berkembangnya kesehatan reproduksi remaja;
- x) Berkembangnya promosi KIA;
- y) Meningkatnya pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A);
- z) Meningkatnya Penanggulangan Penyakit;
- ā) Menular Seksual HIV/AIDS dan Nafza di Sekolah, Karang Taruna dan Pesantren;
- ā) Meningkatnya Tenaga Pendamping Bina Keluarga;
- ö) Meningkatnya Pemahaman Model Operasional;
- aa) Pengembangan KB dan PAUD.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (7) Program Pembentukan P2TP2A dan KPAID sebagai wadah peningkatan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak;
- (8) Program Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dan remaja;

- (9) Program Peningkatan pembentukan kelembagaan anak daerah;
- (10) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan;
- (11) Program Pemantapan forum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- (12) Program Pengadaan data terpilah menurut tema dan jenis kelamin;
- (13) Program Peningkatan pemahaman penyusunan anggaran yang responsif gender;
- (14) Program Pemantapan forum PKHP;
- (15) Program Peningkatan quota perempuan, di lembaga legislatif;
- (16) Program Peningkatan kualitas sumber daya perempuan pengelolaan dan pemasaran hasil;
- (17) Program Peningkatan kemampuan kelembagaan PUG dan anak;
- (18) Program Pengembangan kerjasama perumusan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan PUG;
- (19) Program Penyusunan Perda yang diperlukan untuk pelaksanaan strategi PUG;
- (20) Program Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penundaan usia perkawinan;
- (21) Program Peningkatan kesadaran politik perempuan;
- (22) Program Peningkatan produktivitas ekonomi Perempuan;
- (23) Program Penguatan kapasitas sumberdaya pengelola PUG;
- (24) Program Peningkatan Organisasi dan Pemerhati Perempuan dan Anak;
- (25) Program Pembinaan Pelayanan KB bagi masyarakat Miskin;
- (26) Program Program pembinaan peranserta masyarakat dalam kesehatan reproduksi;
- (27) Program Program Pengembangan Kesehatan Reproduksi Remaja;
- (28) Program Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak;
- (29) Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);

- (30) Program Peningkatan Penanggulangan Penyakit Menular Seksual HIV/AIDS dan Nafza di Sekolah, Karang Taruna dan Pesantren;
- (31) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga;
- (32) Program Pengkajian Model Operasional Pengembangan KB dan PAUD.

B. Sosial

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Masih rendahnya pembinaan dan pelayanan dalam panti sosial;
- c) Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d) Masih kurangnya jumlah dan persebaran peran masyarakat yang terlibat dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial dan masih rendahnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial dikalangan masyarakat;
- e) Masih tingginya penyakit sosial masyarakat dan ketidak berfungsi sosial masyarakat akibat gangguan fisik dan non fisik;
- f) Masih banyaknya daerah rawan bencana dan kejadian bencana alam dan bencana sosial;
- g) Meningkatkan jumlah populasi Tuna Sosial (Waria, Tuna Susila, Gepeng), HIV/AIDS dan pengguna Narkoba;**
- h) Kurangnya fasilitas tumbuh kembang anak;
- i) Kurangnya tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran ;
- b) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan sosial dalam panti melalui panti asuhan/jompo;
- c) Menurunkan angka ketergantungan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- d) Peningkatan kemampuan manajemen dan keterampilan tenaga pelayanan sosial dan pengamalan nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial;
- e) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- f) Penyelamatan, pemulihan dan pemberdayaan korban bencana alam dan bencana sosial serta peningkatan kesiapsiagaan kemungkinan bencana;
- g) Peningkatan penyuluhan terhadap dampak sosial dari penyalahgunaan Narkoba, HIV/AIDS dan Tuna Sosial;**
- h) Pengembangan fasilitas pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui KPAID;
- i) Peningkatan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga (KBK).

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Terlaksananya pembinaan panti sosial sebanyak 4 panti (PSTW, PSAA, PSBRW, PSBR);
- c) Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi : fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- d) Meningkatnya mutu dan jumlah persebaran Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan terlestariannya serta teramalkannya nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan;
- e) Menurunnya angka penyakit sosial masyarakat, tertanganinya anak terlantar, korban narkotika dan obat terlarang serta penyandang cacat;
- f) Tertanganinya korban bencana dan pencegahan korban bencana;
- g) Menurunnya jumlah populasi tuna sosial, HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba;**
- h) Meningkatnya fasilitas pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- i) Meningkatnya pendampingan Kelompok Bina Keluarga.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai ;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (7) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo;
- (8) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan;
- (9) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- (10) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- (11) Program Pembinaan Anak Terlantar;
- (12) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan lainnya);
- (13) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- (14) Program Peningkatan Penanggulangan PMS, HIV/AIDS dan Narkoba di sekolah-sekolah, karangTaruna dan pesantren;
- (15) Program Advokasi tentang pemgebangn fasilitas pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang Anak;
- (16) Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Penerapan Pemerintahan yang Baik;
- (2) Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;
- (3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;

- (4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang meliputi peningkatan pelayanan sosial dasar bagi PMKS;
- (5) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- (6) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

C. Sekretariat Narkoba

1. Masalah

2. Kebijakan

3. Sasaran

4. Program dan Kegiatan

a) Sumber Dana APBD :

b) Sumber Dana APBN :

BAB VIII
AGENDA REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH

VIII.1. FUNGSI PELAYANAN UMUM

A. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Permasalahan

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Belum terwujudnya SIPD Daerah yang lengkap dan mudah di akses;
- c) Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan APBD dan APBN oleh SKPD belum berjalan dengan baik;
- d) Masih kurangnya koordinasi perencanaan pembangunan di sektor air minum, drainase dan sanitasi perkotaan;
- e) Paduserasi perencanaan belum sepenuhnya dilaksanakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah;
- f) Belum optimalnya koodinasi pembangunan di bidang ekonomi;
- g) Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
- h) Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah dan lingkungan hidup;
- i) Belum tersusunnya laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada setiap tahunnya;

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan sistem informasi pembangunan;
- c) Peningkatan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi;
- d) Peningkatan koordinasi pembangunan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan;
- e) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dan arahan kebijakan pembangunan daerah;

- f) Peningkatan koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- g) Peningkatan koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
- h) Peningkatan koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan lingkungan hidup;
- i) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat;
- c) Tersedianya informasi pelaksanaan APBD dan APBN yang informatif;
- d) Terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan sektor air minum, drainase dan sanitasi perkotaan;
- e) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan partisipatif;
- f) Meningkatkan koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- g) Meningkatkan koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- h) Meningkatkan koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan lingkungan hidup;
- i) Tersusunnya LKPJ Gubernur Sultra pada setiap tahun.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;

- (7) Program Pengembangan Data dan Informasi Informasi;
- (8) Program Kerjasama Pembangunan ;
- (9) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
- (10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (11) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- (12) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
- (13) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
- (14) Program Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah;

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

B.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(1) Permasalahan

- a) Belum optimalnya kinerja pelayanan lembaga legislatif.

(2) Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lembaga legislatif.

(3) Sasaran

- a) Terpenuhinya gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.

(4) Program

a) Sumber Dana APBD :

- Penyediaan gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.

B.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Permasalahan

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;

- b) Masih rendahnya kemampuan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah,

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Meningkatkan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Sekretariat Daerah Provinsi

C.1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana, fasilitas pendukung operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, aparatur serta kantor;
- b) Belum optimalnya kinerja aparatur;
- c) Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana, fasilitas pendukung operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b) Meningkatkan disiplin kerja dan kinerja aparatur;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya sarana dan prasarana, fasilitas pendukung operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, aparatur serta kantor;
- b) Meningkatnya kinerja aparatur;
- c) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan gaji dan tunjangan Pejabat Negara serta penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (5) Program Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C.2. Sekretariat Induk

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Sekretariat Daerah, yaitu :

- a) Kurangnya kapasitas keuangan dan belum optimalnya pengelolaan dana pembangunan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di setiap kalurahan dan desa;
- b) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, partai politik, keagamaan, dan pemerintah kabupaten/ kota;
- c) Belum optimalnya penyaluran pembagian hasil pajak dan redistribusi daerah kepada kabupaten/ kota;
- d) Kurang optimalnya penanganan kegiatan tak terduga yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- e) Terbatasnya sarana/ prasarana dan fasilitas pendukung operasional kantor dan aparatur;
- f) Belum optimalnya kinerja aparatur;
- g) Kurangnya modal usaha (investasi) pemerintah daerah.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan kapasitas dan kewenangan pengelolaan dana pembangunan di tingkat kalurahan dan desa;
- b) Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, partai politik, keagamaan, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah;
- c) Meningkatkan penyaluran pembagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota;
- d) Meningkatkan penanganan kegiatan tak terduga yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- e) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan administrasi perkantoran;
- f) Meningkatkan kualitas SDM, disiplin kerja aparatur dan capaian kinerja;
- g) Meningkatkan modal usaha (investasi) pemerintah daerah.

3. Sasaran

- a) Tersalurnya dana pembangunan dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada pemerintah kelurahan dan desa;
- b) Tersalurnya bantuan kepada kelembagaan, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, partai politik, keagamaan, dan pemerintah kabupaten/kota;
- c) Tersalurnya pembagian hasil pajak dan redistribusi daerah kepada kabupaten/ kota;
- d) Tertanganinya kegiatan tak terduga yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- e) Terpenuhinya sarana/ prasarana dan fasilitas pendukung operasional kantor dan aparatur;
- f) Meningkatnya kinerja aparatur;
- g) Meningkatnya modal usaha (investasi) pemerintah daerah.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- Program Desentralisasi fiskal ke tingkat kelurahan dan desa;
- Peningkatan kapasitas kelembagaan, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, partai politik, keagamaan, dan keuangan kabupaten/ kota;
- Program Penyaluran pembagian hasil pajak dan redistribusi daerah;
- Program Penanganan kegiatan tak terduga yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Program Peningkatan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

C.3. Pemerintahan Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu :

- a) Perlunya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah dan instansi vertikal;
- c) Rendahnya kualitas data dan informasi penataan daerah otonom;
- d) Kurangnya terkoordinasinya penyusunan data dan informasi penggunaan/ kepemilikan lahan;
- e) Perlunya pendataan nama unsur geografis, kode dan data wilayah di Prov. Sultra;
- f) Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang proses Pilkada;
- g) Belum maksimalnya pelayanan kegiatan keagamaan dan rendahnya kualitas SDM di bidang Keagamaan;
- h) Kurangn efektifnya penyusunan LKPJ dan LPPD serta rendahnya kemampuan SDM Penyusunan LPPD;
- i) Kurang efektifnya feed back penyelenggaraan pemerintahan dan adanya tumpang tindih kebijakan antara pemprov dengan pemkab/kota;
- j) Masih minimnya pemahaman tentang bahaya penggunaan narkoba;
- k) Kurang Optimalnya penyelenggaraan Lomba UKS;
- l) Rendahnya Kapasitas Pelayanan Pejabat Negara;
- m) Kurangnya koordinasi antar lembaga Pemerintahan dan kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang Kependudukan.
- n) **Masih lemahnya sistem koordinasi antar wilayah bagi daerah-daerah pemekaran.**

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan fasilitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Koordinasi antar daerah / lembaga;
- c) Penataan data dan informasi daerah otonom baru;
- d) Peningkatan koordinasi data dan informasi penggunaan pemilikan tanah;

- e) Pemberian nama unsur geografis, kode dan data wilayah di Prov. Sultra;
- f) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pilkada;
- g) Peningkatan kehidupan beragama dan pelaksanaan MTQ;
- h) Peningkatan efektifitas penyusunan LKPJ dan LPPD;
- i) Peningkatan efektifitas feed back penyelenggaraan pemerintahan Koordinasi antara pemprov dan pemkab/kota se sultra;
- j) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba;
- k) Peningkatan penyelenggaraan lomba UKS;
- l) Peningkatan kapasitas pelayanan pejabat negara;
- m) Peningkatan Koordinasi antar lembaga di bidang Kependudukan;
- n) Fasilitasi pemekaran wilayah dan pembinaan daerah otonom baru.

3. Sasaran

- a) Meningkatnya pelayanan pada publik;
- b) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar pemerintahan daerah dan Instansi vertikal;
- c) Meningkatnya kualitas data dan informasi penataan daerah otonom;
- d) Meningkatnya koordinasi penyusunan data dan informasi penggunaan/ pemilikan tanah;
- e) Tertatanya nama unsur geografis, kode dan data wilayah di Prov. Sultra;
- f) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang proses pilkada;
- g) Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama dan meningkatnya kemampuan, kualitas dan pengalaman lomba para peserta MTQ kafilah SULTRA;
- h) Meningkatnya efektifitas penyusunan LKPJ dan LPPD;
- i) Meningkatnya sinkronisasi kebijakan antara pemprov dengan pemerintah kab/ kota;
- j) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba;
- k) Meningkatnya optimalisasi penyelenggaraan lomba UKS;
- l) Meningkatnya kapasitas pelayanan pejabat negara;

- m) Meningkatnya koordinasi antar lembaga dibidang kependudukan;
- n) Semakin berkembangnya daerah pemekaran lima tahun kedepan yang membutuhkan pembinaan dan perhatian sebagai daerah otonom baru;

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- Program Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran pada Biro Penyusunan Program Setda Prov. Sultra;
- Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal;
- Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
- Program Penyelesaian Konflik;
- Program Pembakuan Nama Unsur Geografis;
- Program Pembinaan Pilkada;
- Program Peningkatan pelayanan kehidupan beragama;
- Program Pembinaan dan pendidikan Keagamaan serta Pengembangan Rumah-rumah Ibadah
- Program Pembinaan Perangkat Daerah;
- Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- Program Penanggulangan Narkoba;
- Program Pembinaan UKS;
- Program Pelayanan Pejabat Negara, DPR RI, MPR, DPD dan DPRD;
- Program Pengembangan Kemitraan Bidang Kependudukan;
- Program Bintek Kependudukan;
- Program Penataan data kependudukan.

(2) Sumber Dana APBN :

- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

(3) Sumber Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) :

- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

C.4. Urusan Umum Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Sarana dan prasarana kantor belum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- c) Kapasitas SDM aparatur masih kurang;
- d) Pelayanan urusan dinas KDH/WKDH belum optimal;
- e) Belum optimalnya penataan ketatausahaan Biro dan pimpinan;
- f) Belum optimalnya penataan kearsipan;
- g) Peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah masih kurang;
- h) Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
- i) Belum optimalnya pelayanan kehumasan daerah.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan kinerja organisasi;
- c) Peningkatan kapasitas SDM;
- d) Peningkatan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran;
- e) Tersusunnya rencana tahunan SKPD;
- f) Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH;
- g) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah;
- h) Mengoptimalkan sarana teknologi informasi;
- i) Peningkatan pelayanan kehumasan daerah.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;

- b) Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c) Optimalisasi kapasitas SDM aparatur;
- d) Pelayanan adminidtrasi perkantoran;
- e) Tertibnya pengelolaan keuangan daerah;
- f) Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi;
- g) Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH;
- h) Meningkatnya pelayanan kehumasan daerah.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;**
- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- Peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD;
- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH;
- Program Penunjang Kehumasan Daerah;
- Program Penataan ketatausahaan biro dan pimpinan;
- Program Arsip dan ekspedisi;
- Program Peningkatan dan pengembangan keuangan daerah;
- Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

C.5. Penyusunan Program Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro Penyusunan Program Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a) Perlunya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Sarana dan Prasarana kantor yang belum memadai;

- c) Masih rendahnya pendidikan dan kualitas sumber daya Manusia pada Biro Penyusunan Program;
- d) Belum tepat waktunya penyusunan program kegiatan dan laporan kinerja tahunan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi;
- e) Belum tepat waktunya penyelesaian Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD, Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- f) Belum optimalnya sinkronisasi program kegiatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- g) Belum optimalnya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penyediaan data pembinaan, petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan administrasi kegiatan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah provinsi;
- h) Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota dalam penyediaan data pembinaan, petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan administrasi kegiatan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/ kota;
- i) Belum intensifnya seluruh penanganan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan APBD dan APBN;
- j) Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan Pengendalian kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota, non pemerintah, dan kerjasama luar negeri.
- k) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan fasilitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- d) Peningkatan koordinasi penyediaan data usulan bahan penyusunan program kegiatan dan laporan kinerja tahunan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi;
- e) Penyediaan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD, Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- f) Penciptaan sinkronisasi program kegiatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- g) Penciptaan koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam pembinaan, penyiapan petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan administrasi kegiatan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah provinsi;
- h) Penciptaan koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota dalam penyediaan data kegiatan, pembinaan, penyiapan petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan administrasi kegiatan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/ kota;
- i) Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan APBD dan APBN;
- j) Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah, non pemerintah, dan kerjasama luar negeri;
- k) Menciptakan keterbukaan, persaingan yang sehat dan adil bagi para pelaku usaha dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah

3. Sasaran

- a) Meningkatnya pelayanan pada publik;
- b) Ketersediaan sarana pendukung transportasi aparatur penyusunan program dan terpeliharanya dengan baik peralatan kantor;
- c) Meningkatnya sumberdaya aparatur penyusun program;
- d) Meningkat dan tersedianya data usulan bahan penyusunan program kegiatan dan laporan kinerja tahunan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi;
- e) Terlaksananya koordinasi dalam penyelesaian Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD, Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- f) Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- g) Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan ketersediaan data pembinaan, petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan administrasi kegiatan pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;

- h) Terlaksananya koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten/ kota serta tersedianya data pembinaan, petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan administrasi kegiatan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota;
- i) Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat dan dunia usaha tentang pelaksanaan APBD dan APBN;
- j) Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah, non pemerintah, dan kerjasama luar negeri.
- k) Terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- Program Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran pada Biro Penyusunan Program Setda Prov. Sultra;
- Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Biro Penyusunan Program;
- Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
- Program Peningkatan sistem perencanaan program pembangunan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi;
- Program Peningkatan koordinasi dalam penyelesaian Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD, Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Program Peningkatan Koordinasi/ Konsultasi Penyusunan APBD, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Pusat;
- Program peningkatan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan dan bantuan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah provinsi;
- Program Pengintensifkan Penanganan dan Dunia Usaha Pengaduan Masyarakat;
- Program pengembangan Sistem Informasi Data pengadaan barang dan jasa;
- Program Pengembangan sistem informasi pihak ketiga/rekanan;

- Program Penyusunan sistem insentif dan disinsentif kepada penyedia Barang dan jasa;
- Program Pengembangan situs Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah;

C.6. Hukum Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Belum efektifnya pengelolaan dokumentasi, sosialisasi dan informasi hukum;
- c) Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d) Masih rendahnya produk hukum daerah;
- e) Belum efektifnya pemberian bantuan hukum pemda dalam penyelesaian kasus;
- f) Belum efektifnya penyelenggaraan RANHAM;
- g) Lemahnya koordinasi PPNS;
- h) Terbatasnya kualitas SDM Biro Hukum Setda Provinsi.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan dokumentasi, sosialisasi dan informasi hukum;
- c) Peningkatan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d) Peningkatan kualitas/ kuantitas produk hukum;
- e) Peningkatan pemberian bantuan hukum pemda dalam penyelesaian kasus;
- f) Peningkatan penyelenggaraan RANHAN;
- g) Peningkatan Kualitas SDM Biro Hukum Setda Provinsi.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Meningkatnya efektifitas pengelolaan dokumentasi, sosialisasi dan informasi hukum;
- c) Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d) Meningkatnya produk hukum daerah;
- e) Meningkatnya pemberian bantuan hukum pemda dalam penyelesaian kasus meningkatnya penyelenggaraan RANHAN;
- f) Meningkatnya koordinasi PPNS;
- g) Meningkatnya kualitas SDM Biro Hukum Setda Provinsi.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Jaringan Sistem Hukum Daerah Provinsi;
- (3) Program Peningkatan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- (4) Program Peningkatan kualitas dan kuantitas Produk hukum daerah;
- (5) Program Peningkatan Bantuan Hukum dalam penyelesaian sengketa baik di dalam maupun diluar pengadilan;
- (6) Program Peningkatan penyelenggaraan RANHAN;
- (7) Program Peningkatnya Penyelenggaraan koordinasi PPNS;
- (8) Program Peningkatan Kualitas SDM Biro Hukum Setda Provinsi.

C.7. Biro Organisasi dan Kepegawaian

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Masih belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah prov. Sultra berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah;
- c) Pelaksanaan tugas-tugas dibidang ketatalaksanaan belum maksimal;
- d) Pelaksanaan analisis jabatan belum optimal dan maksimal;
- e) Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Terbentuknya organisasi perangkat daerah yang mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Optimalnya pelaksanaan analisis jabatan;
- d) Peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan di bidang analisa jabatan;
- e) Peningkatan kualitas SDM kepegawaian.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Terbentuknya organisasi perangkat daerah yang mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c) Optimalnya tugas-tugas dibidang ketatalaksanaan;
- d) Optimalisasi tugas-tugas dibidang analisa jabatan;
- e) Meningkatnya kinerja dibidang kepegawaian.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Program Pengelolaan Data Lembaga Perangkat Daerah;
- (6) Program Penyelenggaraan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja;
- (7) Program Penataan Tata Laksana Pemerintah, Pembangunan, dan Pelayanan Publik;
- (8) Program Peningkatan Analisa Jabatan;
- (9) Program Peningkatan Formasi Jabatan;
- (10) Program Pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara;
- (11) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (12) Program Pelayanan Mutasi Pegawai;
- (13) Program Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural;
- (14) Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai
- (15) Program Pengelolaan Pegawai Kontrak;
- (16) Program Sistem Promosi Karier Aparat Pemda;
- (17) Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- (18) Program Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
- (19) Sistem Insentif dan disinsentif aparat Pemda;
- (20) Pemberian penghargaan kepada PNS yang memasuki usia pensiun;
- (21) Sistem Kontrak Kinerja antara Gubernur dengan para Kepala SKPD;

(22) Sistem Informasi yang Transparan dan Akuntabel;

(23) Sistem Pemberian pelayanan publik yang prima;

(24) Sistem Standar Kinerja Individual Aparat Pemda.

C.8. Ekonomi Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi Perkantoran;
- b) Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima;
- c) Belum terpadunya pembinaan UMKM;
- d) Pengelolaan BUMD belum optimal;
- e) Tingkat kunjungan pada obyek wisata yang masih minim;
- f) Pengembalian bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- g) Belum tertibnya izin pengelolaan potensi pertambangan;
- h) Terjadinya kerawanan pangan;
- i) Sarana dan prasarana perhubungan yang belum memadai;
- j) Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- k) Belum optimalnya Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Asosiasi Dagang;
- l) Pelayanan angkutan yang belum optimal;
- m) Kurangnya produksi bidang budidaya perikanan;
- n) Sarana dan prasarana bidang budidaya perikanan yang belum memadai;
- o) Kurangnya minat investor di sektor perikanan.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan promosi daerah obyek wisata;
- c) Reformasi kebijakan investasi dan pelayanan investasi daerah;
- d) Pelatihan, konsultasi dan promosi UMKM;
- e) Pembinaan produk UMKM;
- f) Peningkatan kemampuan BUMD;
- g) Peningkatan promosi wisata;
- h) Peningkatan pemantauan pelaksanaan bantuan modal usaha;
- i) Penertiban kelayakan pengelolaan pertambangan;
- j) Peningkatan pengawasan distribusi pangan;
- k) Peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan barang dan penumpang;
- l) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan Amdal;
- m) Peningkatan kerjasama dunia usaha;
- n) Peningkatan produksi di bidang budidaya perikanan ;
- o) Pengawasan pemberlakuan tarif angkutan perikanan;
- p) Peningkatan operasional pengawasan operasi perikanan;
- q) Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- r) Peningkatan promosi perikanan dan kelautan.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Terciptanya pelayanan investasi yang efektif dan efisien;
- c) Terpadunya pembinaan UMKM;
- d) Terkelolanya BUMD secara optimal;
- e) Terpromosikannya obyek-obyek wisata utama di Sultra;
- f) Terlaksananya sistem pengembalian bantuan modal usaha dari masyarakat;

- g) Teraturnya proses izin explorasi dan eksploitasi;
- h) Terdistribusinya bantuan pangan secara tepat dan cepat;
- i) Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
- j) Terkendalikannya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- k) Meningkatnya kerjasama dengan asosiasi dagang/dunia usaha;
- l) Tertibnya penerapan tarif angkutan umum dan pelayaran rakyat;
- m) Meningkatnya pengelolaan budidaya tambak;
- n) Terkoordinasinya pengembangan pembinaan penangkapan ikan;
- o) Terlaksananya promosi produk perikanan.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (4) Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi;
- (5) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- (6) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;
- (7) Program Pembinaan dan peninjauan pada BUMD yang sudah Mapan;
- (8) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- (9) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
- (10) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
- (11) Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- (12) Program Pengembangan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- (13) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- (14) Program Kerjasama Pembangunan;
- (15) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

- (16) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- (17) Program Pengembangan pengawasan perikanan tangkap;
- (18) Program Peningkatan Promosi dan Investasi Produk Kelautan.

C.9. Keuangan Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang belum efektif dan efisien.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, akuntabel dan transparan;
- c) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten dan Kota.

C.10. Kesejahteraan Rakyat

1. Permasalahan
2. Kebijakan Umum
3. Sasaran
4. Program dan Kegiatan

(a) Sumber Dana APBD :

C.11. Humas dan Telematika

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Biro Humas dan Telematika Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu:

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Masih rendahnya pelayanan informatika dan komunikasi daerah;
- c) Masih rendahnya kualitas aparatur pengelola data elektronik;
- d) Masih rendahnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kerjasama dengan mass media.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan pelayanan informatika dan komunikasi berbasis data elektronik;
- c) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- d) Pengembangan media penyebarluasan informasi dan komunikasi.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;

- b) Meningkatnya pelayanan informatika dan komunikasi;
- c) Meningkatnya kualitas aparatur pengelola data elektronik;
- d) Tersedianya informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa;
- (7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
- (8) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;

D. Pengawasan Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Rendahnya pemahaman aparatur penyelenggara pemerintah di daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga sering terjadi penyimpangan;
- c) Masih perlunya peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawasan.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas KKN;
- c) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pengawasan yang profesional.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN;
- c) Tersedianya sumberdaya aparatur pengawasan yang profesional, memiliki keterampilan dan integritas yang tinggi.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
- (8) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

D. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu ;

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Keterlibatan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan belum optimal;
- c) Peran pemerintah desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan yang belum optimal;
- d) Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat;
- e) Menurunnya nilai-nilai semangat kegotong royongan serta peran Lembaga Adat yang belum optima;
- f) Minimnya akses pengelolaan SDA dengan Pemanfaatan TTTG;
- g) Kurangnya modal usaha lembaga keuangan mikro pedesaan;
- h) Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan;**
 - i) Terbatasnya lembaga ekonomi mikro sebagai wadah usaha masyarakat di pedesaan;
 - j) Terbatasnya informasi pasar bagi masyarakat desa;
 - k) Masih kurang berfungsinya Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD);
 - l) Rendahnya keberdayaan masyarakat di pedesaan.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan taraf hidup dan kualitas masyarakat miskin pedesaan;
- c) Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- d) Memantapkan peran masyarakat serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- e) Mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis;
- f) Meningkatkan pemanfaatan SDA dan TTTG berwawasan lingkungan;
- g) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin;**
- h) Peningkatan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan antar SKPD dan lembaga lain;**
- i) Pemberdayaan masyarakat miskin;**
- j) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan tersedianya dana kas desa;

- k) Meningkatkan pemasaran hasil produksi masyarakat desa;
- l) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa;
- m) Pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa dalam pembangunan di pedesaan.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Meningkatnya kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin;
- c) Meningkatnya peran aktif dan kemandirian masyarakat serta kelemb. partisipasi dalam pembangunan;
- d) Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat;
- e) Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal dan semangat kegotong royongan serta meningkatkan peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f) Meningkatnya peran serta masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan TTG;
- g) Terpenuhinya modal usaha masyarakat miskin;
- h) Meningkatnya koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah
- i) Terbentuknya Lembaga / Badan Usaha Masyarakat di pedesaan;
- j) Terpenuhinya informasi pasar masyarakat di desa;
- k) Meningkatnya peran fungsi Lumbung Pangan Masyarakat Desa;
- l) Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;

- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (7) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Penanggulangan kemiskinan;
- (8) Program Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
- (9) Program Pemantapan Kelembagaan Masyarakat serta Peningkatan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat;
- (10) Program Pemantapan Kehidupan Sosbud masyarakat;
- (11) Program Pemanfaatan Potensi SDA, Pemasy. Dan Pendayagunaan TTG;
- (12) Program Pengembangan Usaha Masyarakat Miskin;
- (13) Program Peningkatan Peran dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- (14) Program Pengembangan Lembaga Usaha Milik Desa dan Pasar Desa;
- (15) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi di Pedesaan;
- (16) Program Peningkatan Fungsi Lumbung Pangan Masyarakat Desa / Kelurahan;
- (17) Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- (18) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- (19) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
- (20) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

c) Sumber Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) :

- (2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

F. Kantor Penghubung

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Kantor Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran.

2. Kebijakan Umum

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan (Realokasi Kantor Penghubung);*
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ;
- (5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja ;
- (7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;

G. Riset Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Badan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Terbatasnya ketersediaan data dan informasi Litbang di berbagai bidang pembangunan;
- c) Sistem dokumentasi dan Publikasi Litbang masih terbatas;

- d) Kompetensi SDM Bidang IPTEK belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas;
- e) Sarana penunjang operasional Litbang masih terbatas.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan cakupan penelitian dan pengembangan dalam upaya penyediaan data dan informasi yang akurat;
- c) Peningkatan Sistem Dokumentasi dan Publikasi Pembangunan Sultra;
- d) Peningkatan sumber daya manusia bidang Iptek secara kualitas maupun kuantitas;
- e) Peningkatan sarana dan prasarana litbang.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi hasil Litbang di berbagai bidang Pembangunan;
- c) Meningkatnya ketersediaan sistem dokumentasi dan publikasi mengenai pembangunan Sultra;
- d) Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM bidang IPTEK;
- e) Meningkatnya sarana dan Prasarana Pendukung operasional Litbang.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;

- (7) Program Pelaksanaan Riset Unggulan;
- (8) Program Penelitian dan Pengembangan Iptek ;
- (9) Program Kaji-Tindak Implementasi Program Prioritas;
- (10) Program Dokumentasi dan Publikasi;
- (11) Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia bidang Iptek;
- (12) Program Peningkatan dan Pengembangan sarana dan prasarana Litbang.

H. Kearsipan Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a) Masih perlunya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Belum memadainya sistem pengelolaan dan kajian kearsipan pemerintah daerah;
- c) Belum memadainya pelaksanaan akuisisi arsip, pengelolaan/ pemeliharaan dan penyelamatan arsip;
- d) Kurang terpeliharanya sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip;
- e) Kurangnya sistem pengelolaan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kearsipan serta terbatasnya sarana layanan informasi arsip.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan;
- b) Peningkatan intensitas pengelolaan dan pengendalian arsip;
- c) Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kearsipan;
- d) Peningkatan intensitas pengawasan, kualitas pembinaan dan pelayanan arsip.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Terkelolanya sistem administrasi kearsipan;
- c) Terselamatkan dan terlestarikannya arsip-arsip daerah;
- d) Terpeliharanya sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip;
- e) Meningkatnya kualitas layanan informasi kearsipan.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (7) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
- (8) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah;
- (9) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Arsip Daerah;
- (10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- (2) Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

H. Data Elektronik

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Pusat Data dan Elektronik Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Masih rendahnya layanan informatika dan komunikasi daerah;
- c) Masih rendahnya kualitas aparatur pengelola data elektronik;
- d) Masih rendahnya penyebaran informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kerjasama dengan mass media.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran ;
- b) Peningkatan layanan informatika dan komunikasi berbasis data elektronik ;
- c) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- d) Pengembangan media penyebaran informasi dan komunikasi.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Meningkatnya layanan informatika dan komunikasi ;
- c) Meningkatnya kualitas aparatur pengelola data elektronik ;
- d) Tersedianya informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa;
- (8) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
- (9) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

VIII.2. FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN

A. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu:

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Masih rendahnya kemampuan sumberdaya aparatur dalam mendeteksi dini sumber-sumber konflik yang dapat memicu terjadinya kekerasan antar kelompok/kepentingan;
- c) Masih rendahnya . kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- d) Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
- e) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat;
- f) Tingginya ancaman konflik penduduk Sulawesi Tenggara yang disebabkan karena keberagaman etnis, budaya, bahasa dan agama;
- g) Kurangnya kemitraan di dalam mengembangkan wawasan kebangsaan;
- h) Masih rendahnya upaya pencegahan penyakit masyarakat berupa premanisme, prostitusi, perjudian, dan eksploitasi anak;
- i) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota satuan penanggulangan bencana serta dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur dalam mendeteksi sumber konflik yang dapat memicu terjadinya kekerasan antar kelompok;
- c) Peningkatan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- d) Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- e) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat;
- f) Pengendalian ancaman konflik Penduduk Sulawesi Tenggara yang disebabkan karena keberagaman : etnis, budaya, bahasa dan agama;
- g) Peningkatan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan;
- h) Peningkatan upaya pencegahan penyakit masyarakat berupa : premanisme, prostitusi, perjudian, dan eksploitasi anak;
- i) Peningkatan kualitas SDM satuan penanggulangan bencana melalui penyelenggaraan pelatihan penanggulangan korban bencana serta dukungan logistik dan obat-obatan.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur dalam mendeteksi sumber konflik yang dapat memicu terjadinya kekerasan antar kelompok Meningkatkan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- c) Meningkatnya kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- d) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- e) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat;
- f) Menurunnya ancaman konflik Penduduk Sulawesi Tenggara yang disebabkan karena keberagaman etnis, budaya, bahasa dan agama;
- g) Meningkatnya kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan;
- h) Meningkatnya upaya pencegahan penyakit masyarakat berupa : premanisme, prostitusi, perjudian, dan eksploitasi anak;
- i) Meningkatnya kualitas SDM anggota satuan penanggulangan bencana dan dukungan logistik serta obat-obatan.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (7) Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan dan lingkungan;
- (8) Program Pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- (9) Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- (10) Program Pendidikan politik masyarakat;
- (11) Program Pengembangan Wawasan kebangsaan;
- (12) Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- (13) Program Peningkatan upaya pencegahan penyakit masyarakat;
- (14) Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Pemeliharaan Kamtibmas;
- (2) Program Perbaikan Proses Politik;
- (3) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi;
- (4) Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional.

B. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a) Masih perlunya peningkatan layanan administrasi perkantoran dan optimalisasi pengelolaan administrasi perkantoran;
- b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat, baik secara kelompok maupun individu terhadap kesadaran hukum dan norma;
- c) Masih adanya potensi konflik sosial di masyarakat maupun lingkungannya.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran ;
- b) Pelaksanaan operasi lapangan;
- c) Pemeliharaan kamtibmas.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin serta terlaksananya pelayanan administrasi;
- b) Terciptanya kondisi masyarakat yang sadar dan taat hukum;
- c) Terjaganya kondisi lingkungan.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ;
- (5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (8) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- (9) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal;

BAB IX AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI

IX.1. Fungsi Ekonomi

A. Ketenagakerjaan

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;
- b) Masih tingginya jumlah pengangguran;
- c) Rendahnya Rendahnya kualitas angkatan kerja;
- d) Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- e) Rendahnya pemahaman hubungan industrial dan perlindungan hukum bagi pekerja dan pemberi kerja;
- f) Masih rendahnya pembinaan lembaga yang mengelola penyaluran tenaga kerja.

2. Kebijakan Umum

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan tenaga kerja;
- c) **Fasilitasi penyediaan lapangan kerja diseluruh sektor ekonomi dan membuka peluang berusaha bagi para pengangguran;**
- d) Perluasan kesempatan kerja melalui pembinaan padat karya produktif **untuk menyerap tenaga pengangguran;**
- e) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dan pemberi kerja ;
- f) Pembinaan penyaluran tenaga kerja melalui program kerjasama dengan perusahaan.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan aparatur yang bersifat rutin;
- b) Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;
- c) Meningkatnya kompetensi dan kualitas tenaga kerja;
- d) Terbukanya informasi dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan terserapnya tenaga kerja pada lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dari 9,67% di tahun 2006 menjadi dibawah 5 % pada tahun 2013;
- e) Terciptanya perlindungan tenaga kerja, ketenangan bekerja dan beresiko serta adanya kepastian hukum bagi pelaku produksi;
- f) Terbinanya lembaga yang mengelola penyaluran tenaga kerja.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- (6) Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (7) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- (8) Peningkatan Kesempatan Kerja;
- (9) Pembinaan Usaha Produktif;
- (10) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- (11) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- (2) Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
- (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

B. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yaitu :

- a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;
- b) Lemahnya sistem pembinaan dan pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- c) Belum optimalnya koordinasi dalam pengembangan Koperasi dan UMKM;
- d) Masih rendahnya akses permodalan KUMKM;
- e) Belum optimalnya pengembangan iklim usaha bagi UMKM dan Koperasi;
- f) Masih terbatasnya pengembangan usaha bagi UMKM dan Koperasi.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur;
- b) Mengembangkan dan Meningkatkan Sistem Pembinaan dan pendataan UMKM;
- c) Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan lembaga kemasyarakatan melalui dukungan sistem pengembangan UKM dan promosi serta kerjasama investasi;
- d) Peningkatan akses permodalan KUMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan baik Bank maupun non Bank.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran;
- b) Meningkatnya sistem pembinaan dan tersedianya data base tentang UMKM;
- c) Meningkatnya sistem koordinasi dan pembinaan koperasi dan UMKM;
- d) Meningkatkan akses permodalan KUMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan baik Bank maupun non Bank.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (6) Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD;
- (7) Program Penciptaan iklim usaha mikro, kecil dan menengah yang kondusif;
- (8) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM;
- (9) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- (10) Program pengembangan Sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Penciptaan Iklim usaha UMKM;
- (2) Program Pengembangan Kewirausahaan;
- (3) Program Pengembangan Kualitas Kelembagaan;
- (4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (5) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

C. Penanaman Modal

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Penanaman Modal, yaitu :

- a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;
- b) Belum kondusifnya iklim investasi.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur;
- b) Peningkatan iklim investasi daerah melalui perbaikan regulasi dan sistem informasi sumberdaya daerah;
- c) *Pengembangan investasi melalui penjangkaran minat investor dan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral.*

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran serta fasilitas pendukung;
- b) Meningkatnya iklim investasi daerah.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1).Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- (2).Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3).Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (4).Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5).Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (6).Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD;
- (7).Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- (8).*Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi ;*
- (9).Program Pengembangan penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah yang meliputi kegiatan.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- (2) *Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;*
- (3) Program Pengembangan penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah;
- (4) Program Pengembangan Pengendalian Investasi.

D. Ketahanan Pangan

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi bidang Ketahanan Pangan, yaitu :

- a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;
- b) Masih tingginya tingkat konsumsi beras yaitu 110,2 Kg/kap/tahun;

- c) Masih tingginya daerah rawan pangan;
- d) Masih rendahnya mutu dan keamanan pangan.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur;
- b) Meningkatkan penganeekaragaman pangan melalui diversifikasi konsumsi pangan lokal;
- c) Meningkatkan akses distribusi pangan dan daya beli masyarakat yang terjangkau;
- d) Peningkatan fasilitasi penanganan mutu dan keamanan pangan.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran;
- b) Menurunkan ketergantungan terhadap konsumsi beras melalui diversifikasi vertikal konsumsi pangan;
- c) Menurunnya kategori desa rawan pangan;
- d) Meningkatnya mutu dan Keamanan pangan;

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan;
- (6) Program Peningkatan ketahanan pangan.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Ketahanan Pangan;
- (2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

E. Pertanian

1. Pertanian

a) Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Pertanian adalah sebagai berikut :

- (1) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;
- (2) Produksi, produktifitas dan Pendapatan petani masih rendah karena penggunaan sarana produksi belum optimal ;
- (3) Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pertanian sehingga nilai tambah produksi pertanian masih rendah;
- (4) Akses petani ke sumberdaya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha masih sangat terbatas;
- (5) Masih kurangnya akses pemasaran komoditas hasil pertanian dan petani, baik lokal, nasional dan internasional;
- (6) Masih terbatasnya infrastruktur pertanian dan belum optimalnya pemanfaatan lahan;
- (7) Produksi dan produktivitas peternakan masih rendah;
- (8) Masih rawannya peredaran hasil ternak yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) dan terjadinya penyakit pada ternak'
- (9) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian.

b) Kebijakan Umum

- (1) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur;
- (2) Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian sekaligus pendapatan petani melalui intensifikasi,ektensifikasi diversifikasi dan rehabilitasi serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
- (3) Peningkatan penyebarluasan informasi dan rekayasa teknologi;
- (4) Perbanyak skim kredit yang dapat diakses oleh petani dan pelaku agribisnis;
- (5) Mengembangkan sistem akses pemasaran komoditas hasil pertanian;

- (6) Peningkatan pengembangan infrastruktur pertanian dan optimalisasi pemanfaatan lahan dalam mendukung ketahanan pangan;
- (7) Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak dengan menjaga kelestarian populasi dalam mendukung Sultra sebagai sumber bibit sapi Nasional;
- (8) Peningkatan keamanan pangan asal ternak dan penanggulangan penyakit pada ernak;
- (9) Meningkatkan sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pertanian untuk peningkatan nilai tambah produksi pertanian;
- (10)Peningkatan kemampuan/kualitas sumberdaya pertanian.

c) Sasaran

- (1) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran;
- (2) Meningkatnya produksi dalam rangka peningkatan petani dan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi;
- (3) Meningkatnya akses penyerapan teknologi di tingkat usahatani guna meningkatkan produktifitas pertanian;
- (4) Meningkatnya jumlah dan permodalan pada lembaga-lembaga
- (5) Meningkatnya akses pemasaran komoditas hasil pertanian;
- (6) Penyediaan sarana prasarana irigasi dan jalan usahatani yang lebih meli komdoitas pertanian;
- (7) Meningkatnya populasi ternak melalui INKA, IB, dan kualitas HMT serta produksi pangan hewani;
- (8) Terjaminnya peredaran hasil ternak. ASUH dan terjaminnya kesehatan hewan;
- (9) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian.

d) Program

(1) Sumber dana APBD :

- Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- Program Pengembangan Sistem Pelaporan;
- Program Peningkatan Produksi Pertanian;
- Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian,
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- Program Peningkatan pemasaran hasil pertanian;
- Program Peningkatan ketahanan pangan;
- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

(2) Sumber Dana APBN :

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- Program Pengembangan Agribisnis;

2. Perkebunan

a) Permasalahan

Permasalahan pokok pembangunan perkebunan dan hortikuli sebagai berikut :

- (1) Terbatasnya kemampuan sarana pendukung administrasi perkantoran;
- (2) Masih rendahnya kualitas kelembagaan;
- (3) Keragaman Produk yang Masih rendah serta masih terbatasnya Informasi Pasar;
- (4) Produksi, Produktivitas dan Mutu hasil yang masih rendah;
- (5) Terbatasnya Kemampuan SDM.

b) Kebijakan Umum

- (1) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur;
- (2) Mengembangkan kualitas kelembagaan;

- (3) Melaksanakan peningkatan Jaminan Mutu, Pengembangan Produk Olahan dan Pelayanan Informasi Pasar;
- (4) Melaksanakan kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi, diversifikasi dan Rehabilitasi komoditi unggulan dan andalan;
- (5) Melaksanakan Diversifikasi dan Pengolahan komoditi Pangan Lokal;
- (6) Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan Teknologi pra panen dan pasca panen;
- (7) **Fasilitasi dukungan pelaksanaan investasi swasta di bidang perkebunan.**

c) Sasaran

- (1) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran;
- (2) Meningkatnya kualitas kelembagaan petani;
- (3) Meningkatnya jumlah dan Keragaman Produk Olahan serta meningkatnya pelayanan pelayanan informasi pasar;
- (4) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas serta Mutu hasil Perkebunan dan Hortikultura;
- (5) Meningkatkan keragaman produksi perkebunan dan Produk olahan komoditi pangan lokal;
- (6) Meningkatkan Kemampuan SDM Petani dan Petugas dalam pengembangan komoditi Perkebunan dan Hortikultura;
- (7) **Berkembangnya investasi swasta di bidang perkebunan.**

d) Program

(1) Sumber Dana APBD :

- Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Program Peningkatan kesejahteraan petani;

- Program peningkatan ketahanan pangan;
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi hortikultura dan Perkebunan;
- Program peningkatan produksi hortikultura dan produksi perkebunan;
- Program Penerapan teknologi perkebunan/hortikultura;
- Program pemberdayaan Perkebunan dan asosiasi perkebunan.
- *Program Pengembangan Komoditas Buah-buahan (Rambutan dan Langsat) di Kecamatan Ranomeeto.*

(2) Sumber Dana APBN ;

- Program Pengembangan Agribisnis;
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

(3) Program Pembangunan Kewilayahan ;

- Program Pengembangan Industri Kelapa Sawit di wilayah Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Buton Utara.

3. Penyuluhan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

a) Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Penyuluhan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- (1) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;
- (2) Belum optimalnya sistim penyuluhan dalam mendukung pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- (3) Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- (4) Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian, perikanan dan kehutanan.

b) Kebijakan Umum

- 1) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur;
- 2) Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 3) Peningkatan Kemampuan/Kualitas SDM Penyuluh Pertanian, perikanan dan kehutanan.

c) Sasaran

- (1) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran;
- (2) Meningkatnya kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta sistem penyelenggaraan penyuluhan;
- (3) Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh.

d) Program

(1) Sumber Dana APBD :

- Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Program Pemberdayaan penyuluh pertanian;
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian;
- Program Produksi Hasil Peternakan;
- Program Peningkatan Kesadaran dan Pengakan Hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut;
- Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan;

(2) Sumber Dana APBN :

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

(3) Sumber Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) :

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

F. Kehutanan

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Kehutanan, yaitu :

- a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;
- b) Masih rendahnya pengelolaan kawasan hutan berdasarkan prinsip kelestarian;
- c) Semakin bertambahnya lahan kritis pada kawasan hutan akibat laju degradasi dan deforestasi semakin besar;
- d) Semakin meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah;
- e) Masih rendahnya keterpaduan perencanaan bidang kehutanan;
- f) Masih rendahnya akses data dan informasi pembangunan kehutanan.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur;
- b) Mengembangkan sistem pengelolaan kawasan hutan berdasarkan prinsip kelestarian;
- c) Meningkatkan pencegahan terhadap laju degradasi dan deforestasi;
- d) Peningkatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di daerah;
- e) Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan bidang kehutanan;
- f) Mengembangkan sistem akses data dan informasi pembangunan kehutanan.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran;
- b) Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian;

- c) Menurunnya lahan kritis pada kawasan hutan Terwujudnya pelaksanaan RHL;
- d) Menurunnya kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah;
- e) Terwujudnya keterpaduan perencanaan bidang kehutanan;
- f) Meningkatnya akses data dan informasi pembangunan kehutanan.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (6) Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan;
- (7) Program pemanfaatan sumberdaya hutan;
- (8) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- (9) Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan;
- (10) Program Perencanaan dan pengembangan hutan;
- (11) Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH;

b) Sumber dana APBN :

- (1) Program pemantapan pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan;
- (2) Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA;
- (3) Program Perlindungan dan Konservasi SDA;
- (4) Program Pemantapan keamanan dalam negeri;
- (5) Program Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan lahan;
- (6) Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH;
- (7) Program Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan;
- (8) Program Pendidikan dan pengembangan IPTEK serta pendidikan kedinasan.

G. Sumber Daya Mineral

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Sumber daya Mineral, yaitu :

- a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;
- b) Belum bersinerginya kebijakan dan program pembangunan sumberdaya mineral;
- c) Belum optimalnya penerimaan daerah bidang energi dan sumberdaya;
- d) Masih rendahnya kualitas pengelolaan usaha pertambangan;
- e) Masih terjadinya penambangan yang berpotensi merusak lingkungan;
- f) Belum optimalnya pemanfaatan peralatan eksplorasi, survey dan laboratorium energi dan sumberdaya mineral;
- g) Masih kurangnya publikasi data dan informasi kegeologian;
- h) Belum optimalnya pengelolaan aset bidang energi dan sumberdaya mineral.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur.;
- b) Meningkatkan Paduserasi kebijakan dan program/kegiatan pembangunan bidang energi dan sumberdaya mineral
- c) Optimalisasi penerimaan daerah bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d) Mengembangkan kualitas pengelolaan usaha pertambangan;
- e) Mengendalikan kegiatan penambangan yang berpotensi merusak lingkungan;
- f) Mengoptimalkan pemanfaatan peralatan eksplorasi survey dan laboratorium energi dan sumberdaya mineral;
- g) Meningkatkan publikasi data dan informasi kegeologian;
- h) Mengoptimalkan pengelolaan aset bidang energi dan sumberdaya mineral.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran;
- b) Bersinerginya kebijakan dan program pembangunan bidang energi dan sumberdaya mineral antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c) Meningkatnya penerimaan daerah bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d) Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha pertambangan;
- e) Menurunnya penambangan yang berpotensi merusak lingkungan;
- f) Meningkatnya pemanfaatan peralatan eksplorasi, survey dan laboratorium energi dan sumberdaya mineral;
- g) Meningkatnya publikasi data dan informasi kegeologian;
- h) Optimalnya pengelolaan aset bidang energi dan sumberdaya mineral.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ;
- (5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (6) Program Peningkatan Paduserasi Kebijakan dan Program Pembangunan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- (7) Program Peningkatan Penerimaan Daerah bidang energi dan sumberdaya mineral;
- (8) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
- (9) Program Pengawasan dan penerbitan kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
- (10) Program optimalisasi pemanfaatan peralatan ekspolarasi, survey, laboratorium dan : SIG;

- (11) Program Peningkatan penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi kegeologian;
- (12) Program optimalisasi pengelolaan aset bidang energi dan sumberdaya mineral.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

H. Kelautan dan Perikanan

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi bidang kelautan dan perikanan, yaitu :

- a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;
- b) Menurunnya kualitas lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta belum optimalnya pemanfaatan potensi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c) Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya kelautan;
- d) Rendahnya tingkat produktivitas perikanan budidaya;
- e) Kurangnya sarana dan prasarana serta kelembagaan perikanan tangkap;
- f) Terbatasnya SDM penyuluh perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan belum memadai;
- g) Rendahnya mutu hasil olahan dan pemasaran produksi perikanan.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur;
- b) Meningkatkan kualitas lingkungan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ;
- c) Mengembangkan sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan;
- d) Mengembangkan sistem budidaya perikanan yang optimal;
- e) Meningkatkan sarana dan prasarana serta kelembagaan perikanan tangkap;
- f) Meningkatkan SDM penyuluh perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan;

- g) Mengembangkan sistem mutu hasil olahan dan peningkatan pemasaran produksi perikanan.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran;
- b) Meningkatnya kualitas lingkungan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta optimalnya pemanfaatan potensi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d) Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya;
- e) Tersedianya sarana dan prasarana serta meningkatnya kelembagaan perikanan tangkap;
- f) Tersedianya SDM penyuluh perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan;
- a) Meningkatnya mutu hasil olahan dan pemasaran produksi perikanan.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (6) Program pemberdayaan masyarakat pesisir;
- (7) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut;
- (8) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;
- (9) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut;
- (10) Pengembangan Budidaya Perikanan;

- (11) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/ air payau dan air tawar;
- (12) Program Pengembangan Perikanan Tangkap/KIP Wawonii;
- (13) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan perikanan;
- (14) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program pengembangan sumberdaya perikanan;
- (2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya perikanan.
- (3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan;
- (4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam;
- (5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;
- (6) Program Pengembangan Sistem Perencanaan.

c) Sumber Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) :

- (1) Program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan.

I. Perdagangan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Perdagangan, adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan

- a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;
- b) Masih rendahnya mutu dan daya saing produk ekspor daerah;
- c) Masih kurangnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa untuk perlindungan konsumen;
- d) Belum berkembangnya perdagangan skala kecil dan menengah di daerah;
- e) Terbatasnya modal dan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana aparatur;
- b) Meningkatkan mutu dan daya saing produk ekspor daerah;

- c) Mengembangkan sistem pengawasan peredaran barang dan jasa;
- d) Mengembangkan skala usaha kecil dan menengah yang optimal;
- e) Membina dan menyediakan lokasi, sarana dan permodalan bagi Pedagang Kaki Lima dan asongan.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran;
- b) Meningkatnya mutu dan daya saing produk ekspor daerah;
- c) Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;
- d) Meningkatnya perdagangan skala kecil dan menengah di daerah;
- e) Tersedianya Modal dan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pelayanan administrasi perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (6) Program peningkatan dan pengembangan ekspor;
- (7) Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- (8) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- (9) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

J. Industri

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Industri, adalah sebagai berikut :

- a) Masih terbatasnya sektor industri kecil dan menengah di Sulawesi Tenggara;
- b) Masih rendahnya kemampuan teknologi industri di Sulawesi Tenggara;
- c) Belum bertumbuhnya Industri skala menengah dan besar di daerah;
- d) Terbatasnya sentra-sentra IKM potensial.

2. Kebijakan Umum

- a) Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Tenggara;
- b) Meningkatkan kemampuan teknologi industri se Sulawesi;
- c) Mendorong tumbuhnya industri skala menengah dan besar di daerah;
- d) Mengembangkan sentra-sentra IKM potensial.

3. Sasaran

- a) Berkembangnya sektor IKM di Sulawesi Tenggara;
- b) Meningkatnya kemampuan Teknologi Industri di Sulawesi;
- c) Bertumbuhnya industri skala menengah dan besar di daerah;
- d) Berkembangnya sentra-sentra IKM potensial.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PIKM);
- (2) Program peningkatan kemampuan teknologi industri;
- (3) Program penataan struktur industri;
- (4) Program Pengembangan sentra-sentra industri Potensial.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- (2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- (3) Program Penataan Struktur Industri;
- (4) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

K. Ketransmigrasian

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Industri, adalah sebagai berikut :

- a) Terdapat desa-desa terpencil dan kurang berkembang yang berada pada kawasan strategis untuk penyelenggaraan transmigrasi;
- b) Terdapat lokasi permukiman transmigrasi yang tingkat perkembangannya lambat, sehingga diperlukan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk mempercepat pengakhiran status UPT.

2. Kebijakan Umum

- a) Mengembangkan dan memberdayakan wilayah-wilayah tertinggal dalam rangka pemerataan pembangunan;
- b) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh.

3. Sasaran

- a) Berkembangnya desa-desa pada kawasan strategis melalui pembangunan Unit Permukiman Transmigrasi Baru (UPTB);
- b) Terbinanya Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang telah ada (PTA) sebagai wilayah strategis dan cepat tumbuh.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
- (2) Program Transmigrasi lokal.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal;
- (2) Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

L. Pendapatan dan Aset Daerah

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a) Terbatasnya sarana pendukung administrasi perkantoran;
- b) Terbatasnya dukungan dana dan tenaga profesional.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/ prasarana aparatur;
- b) Meningkatkan pendapatan dalam menunjang kegiatan.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran;
- b) Terpenuhinya dana dan tenaga yang mampu.

4. Program dan Kegiatan

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD;
- (7) Program Peningkatan dan Pengembangan PAD;
- (8) Program Peningkatan dan Pengembangan UPTD/SAMSAT;
- (9) Program Pengkajian Peningkatan Pendapatan Daerah;
- (10) Program Pembinaan dan Peningkatan Retribusi Pendataan Obyek Retribusi;

- (11) Program Peningkatan Penerimaan;
- (12) Program Intensifikasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak;
- (13) Program Intensifikasi Penerimaan;
- (14) Program Rasionalisasi Kontrak Karya PT. INCO;
- (15) Program Intensifikasi Penerimaan;
- (16) Program Pembinaan Teknik.

BAB X

AGENDA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

X.1. Fungsi Pariwisata dan Budaya

A. Kebudayaan

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- a) Belum maksimalnya pengembangan berbagai kegiatan pelestarian nilai budaya;
- b) Kurang optimalnya pengelolaan kekayaan budaya daerah;
- c) Belum optimalnya pengelolaan keragaman budaya dan seni
- d) Kurangnya koordinasi dan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan pengembangan nilai budaya sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pembangunan seni dan budaya;
- b) Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya daerah;
- c) Meningkatkan pengelolaan keragaman budaya dan Seni di daerah;
- d) Meningkatkan kerjasama yang harmonis dalam pengelolaan kekayaan budaya

3. Sasaran

- a) Berkembangnya nilai budaya yang ditunjukkan dengan meningkatnya berbagai kajian, penelitian, pengembangan dan pelestarian terhadap nilai budaya;
- b) Meningkatnya kelestarian kekayaan budaya dan peninggalan sejarah;
- c) Berkembangnya keragaman budaya dan seni daerah;
- d) Terjalannya kerjasama dan koordinasi lintas sektor, lembaga dan wilayah dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Pengembangan Nilai Budaya;
- (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
- (4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Pengembangan Nilai Budaya;
- (2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

B. Pariwisata

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung operasional kantor dan aparatur;
- b) Belum optimalnya kinerja aparatur;
- c) Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata ;
- d) Kurangnya pengembangan daerah tujuan wisata;
- e) .Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- f) Kurangnya inovasi dan pengembangan kerajinan lokal khas daerah yang dapat menjadi daya tarik wisata.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Meningkatkan kualitas SDM, disiplin kerja aparatur dan capaian kinerja;
- c) Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pengembangan ODTW Sultra ;
- d) Meningkatkan pengembangan daerah tujuan wisata untuk menarik kunjungan wisatawan;
- e) Menciptakan kondisi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat di bidang pariwisata;

- f) Meningkatkan pengembangan kerajinan khas daerah sehingga dapat menjadi daya tarik wisata.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya sarana/prasarana dan fasilitas pendukung operasional kantor dan aparatur;
- b) Meningkatnya kinerja aparatur;
- c) Meningkatnya kerjasama promosi, dan pemasaran pariwisata;
- d) Berkembangnya daerah tujuan wisata yang ditunjukkan dengan meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan di suatu obyek wisata;
- e) Berkembangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- f) Berkembangnya berbagai jenis kerajinan khas daerah Sultra sebagai cenderamata khas daerah.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (7) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- (8) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- (9) Program Pengembangan Kemitraan;
- (10) Program Pengembangan Kerajinan Khas Daerah;
- (11) Program Pengembangan Wisata Maritim.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

XI.1. Fungsi Ekonomi

A. Perhubungan

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang perhubungan adalah sebagai berikut.

- a) Terbatasnya sarana/ prasarana dan fasilitas pendukung kantor dan aparatur;
- b) Belum optimalnya kinerja aparatur;
- c) Terbatasnya dokumen rencana serta prasarana dan fasilitas perhubungan;
- d) Rendahnya kualitas dan kurangnya prasarana serta fasilitas pengendalian dan pengamanan LLAJ;
- e) Rendahnya kuantitas pelayanan umum yang disebabkan kurangnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
- f) Terbatasnya fasilitas pelabuhan laut;
- g) Terbatasnya fasilitas bandara dan pengendalian lalu lintas udara;
- h) Belum optimalnya evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta peloporan bidang postel;
- i) Terbatasnya ketersediaan dan rendahnya kualitas prasarana serta fasilitas LLAJ;
- j) Kurangnya subsidi untuk meningkatkan aksesibilitas dan belum optimalnya pelayanan LLAJ;
- k) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ASDP;
- l) Terbatas dan rendahnya aksesibilitas, kualitas serta ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut;
- m) Belum optimalnya pelayanan serta keterbatasan sarana dan prasarana transportasi udara.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Meningkatkan disiplin, kapasitas, sistem pelaporan dan kinerja aparatur;
- c) Meningkatkan sistem perencanaan dan pembangunan dan prasarana serta fasilitas perhubungan;
- d) Meningkatkan kondisi prasarana dan Fasilitas serta keselamatan LLAJ;
- e) Meningkatkan pelayanan angkutan umum untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan para pengguna jasa angkutan umum;
- f) Meningkatkan fasilitas pelabuhan laut dan pengendalian lalu lintas angkutan laut untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan para pengguna jasa angkutan laut;
- g) Meningkatkan fasilitas bandara dan pengendalian lalu lintas angkutan udara untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan para pengguna jasa angkutan udara
- h) Meningkatkan evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan Bidang Perhubungan Pos dan Telekomunikasi;
- i) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana serta fasilitas LLAJ;
- j) Meningkatkan aksesibilitas dan restrukturisasi pelayanan angkutan LLAJ;
- k) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ASDP;
- l) Meningkatkan aksesibilitas serta sarana dan prasarana transportasi laut untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan para pengguna jasa angkutan laut;
- m) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan serta sarana dan prasarana transportasi udara;

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya sarana/ prasarana fasilitas pendukung aparatur dan kantor untuk kantor induk dan seluruh UPTD;
- b) Meningkatnya kinerja aparatur;
- c) Tersedianya dokumen rencana, dan meningkatnya prasarana serta fasilitas perhubungan;
- d) Meningkatnya kualitas dan ketersediaan prasarana serta fasilitas LLAJ;
- e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum;

- f) Meningkatnya fasilitas pelabuhan laut dan terkendalinya lalu lintas angkutan laut;
- g) Meningkatnya fasilitas bandara dan terkendalinya lalu lintas angkutan udara, khusus bandara WMI dapat dioperasikan untuk Embarkasi Haji;
- h) Meningkatnya evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang Postel;
- i) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana serta fasilitas LLAJ;
- j) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan angkutan LLAJ;
- k) Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana ASDP;
- l) Meningkatnya aksesibilitas, ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana transportasi laut;
- m) Terwujudnya peningkatan pelayanan serta sarana dan prasarana transportasi udara, khusus Bandara WMI menjadi embarkasi haji;

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- (6) Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja;
- (7) Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- (8) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- (9) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
- (10) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- (11) Program Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut;
- (12) Program Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Angkutan Udara;
- (13) Program Evaluasi, Pengawasan, Pengendalian serta Pelaporan Bidang Perhubungan Postel.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- (2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- (3) Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ;
- (4) Program Restrukturisasi Kelembagaan Dan Prasarana LLAJ;
- (5) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP;
- (6) Program Rehabilitasi prasarana dermaga sungai, danau dan penyeberangan;
- (7) Program Pembangunan Transportasi Laut;
- (8) Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi laut;
- (9) Program Pembangunan Transportasi Udara;
- (10) Program Rehabilitasi dan pemeliharaan transportasi udara.

B. Energi

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Energi, yaitu :

- a) Rendahnya Ratio Elektrifikasi;
- b) Belum optimalnya pelayanan dan kurangnya sarana serta prasarana tenaga listrik;
- c) Belum optimalnya kinerja penyusunan program sarana dan prasarana ketenagalistrikan;
- d) Rendahnya aksesibilitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;
- e) Belum terpenuhinya kebutuhan listrik;
- f) Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi alternatif perdesaan.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan pengembangan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;
- b) Meningkatkan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;
- c) Meningkatkan kinerja penyusunan program sarana dan prasarana ketenagalistrikan;

- d) Meningkatkan aksesibilitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
- e) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Listrik;
- f) Mengembangkan pemanfaatan potensi energi alternatif pedesaan.

3. Sasaran

- a) Meningkatnya Ratio Elektrifikasi;
- b) Terselenggaranya sosialisasi /desimimasi/seminar /wosrkshop/ publikasi dan tersedianya listrik pedesaan;
- c) Tersusunnya program, tersedianya informasi dan terlaksananya bintek ketenagalistrikan;
- d) Terlasaksananya pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;
- e) Terpenuhinya kebutuhan listrik dan elektrifikasi.
- f) Meningkatnya pemanfaatan potensi energi alternatif pedesaan.

4. Program

a) Sumber Dana APBD:

- (1) Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan;
- (2) Program Pengembangan Desa Mandiri Energi.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;
- (2) Program Penyempurnaan reksrtukturisasi dan reformasi sarana dan prasarana ketenagalistrikan;
- (3) Program Peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;
- (4) Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi.

XI.2. Fungsi Lingkungan Hidup

A. Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

a) Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam penataan ruang, yaitu :

- (1) Belum mantapnya sistem perencanaan dan pengelolaan tata ruang serta belum terintegrasinya pemanfaatan ruang wilayah.

b) Kebijakan Umum

- (1) Terselenggaranya sosialisasi perundang-undangan dan dokumen tata ruang, serta meningkatnya sistem perencanaan dan pengelolaan penataan ruang.

c) Sasaran

- (1) Meningkatkan sistem perencanaan dan pengelolaan penataan ruang.

d) Program dan Kegiatan

(1) Sumber Dana APBN :

- Program Penataan Ruang;
- Program Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan

2. Perencanaan Pembangunan

a) Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam penataan ruang, yaitu :

- (1) Belum mantapnya sistem perencanaan dan pengelolaan tata ruang serta belum terintegrasinya pemanfaatan ruang antar wilayah;

b) Kebijakan Umum

- (1) Meningkatkan sistem perencanaan dan pengelolaan penataan ruang;

c) Sasaran

- (1) Terselenggaranya sosialisasi perundang-undangan dan dokumen tata ruang, serta meningkatnya sistem perencanaan dan pengelolaan penataan ruang.

d) Program

(1) Sumber Dana APBD :

- Program Perencanaan Penataan ruang.

B. Lingkungan Hidup

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang lingkungan hidup yaitu :

- a) Terbatasnya sarana/ prasarana dan fasilitas pendukung kantor dan aparatur;
- b) Belum optimalnya kinerja aparatur;
- c) Rendahnya etika dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masyarakat dlm pengelolaan lingkungan hidup;
- d) Terbatasnya Akses data dan informasi lingkungan hidup;
- e) Masih rendahnya kinerja pengelolaan persampahan;
- f) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g) Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- h) Kurang berkembangnya ekowisata dan jasa lingkungan;
- i) Sulitnya pengendalian kebakaran hutan;
- j) Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem pesisir dan laut;
- k) Kurang optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau;
- l) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- m) Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Meningkatkan disiplin, kapasitas, sistem pelaporan dan kinerja aparatur;
- c) Meningkatkan etika dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masyarakat dlm pengelolaan lingkungan hidup;
- d) Meningkatkan akses data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- e) Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan;
- f) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g) Melindungi dan meningkatkan konservasi sumber daya alam;
- h) Mengembangkan ekowisata dan jasa lingkungan;
- i) Mengendalikan kebakaran hutan;
- j) Mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
- k) Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau;
- l) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- m) Melindungi dan meningkatkan konservasi sumber daya alam.

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya sarana/ prasarana dan fasilitas pendukung kantor dan aparatur;
- b) Meningkatnya kinerja aparatur;
- c) Meningkatnya etika dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masyarakat dlm pengelolaan lingkungan hidup;
- d) Meningkatnya akses data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- e) Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan;
- f) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g) Terpeliharanya sumber daya alam;
- h) Berkembangnya ekowisata dan jasa lingkungan;
- i) Terkendalinya kebakaran hutan;

- j) Terkelolanya dan terpeliharanya ekosistem pesisir dan laut;
- k) Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau.
- l) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

4. Program

a) Sumber Dana APBD:

- (1) Program Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Tahunan;
- (7) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- (8) Program Penataan Hukum dan Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan;
- (9) Program Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan LH;
- (10) Program Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan dalam Pengelolaan LH;
- (11) Program Pengembangan Pendidikan Etika dan Moral Lingkungan;
- (12) Program Pembinaan Masyarakat pada Kawasan Rawan Dampak Lingkungan;
- (13) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup;
- (14) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- (15) Program Pengendalian Pencemaran LH;
- (16) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- (17) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam;
- (18) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- (2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;
- (3) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

c) Program Lintas SKPD :

- (1) Program Pengendalian Kebakaran Hutan;
- (2) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;
- (3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

XI.3. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

A. Pekerjaan Umum

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi bidang pekerjaan umum, adalah sebagai berikut :

- a) Terbatasnya sarana/ prasarana dan fasilitas pendukung operasional kantor dan aparatur;
- b) Belum optimalnya kinerja aparatur;
- c) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- d) Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan banjir;
- e) Masih terbatas sarana dan prasarana sumber daya air untuk mendukung ketersediaan daya listrik dan air baku;
- f) Terbatasnya akses dan kualitas jalan provinsi dan jalan strategis lainnya;
- g) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan;
- h) Rendahnya kualitas jasa konstruksi;
- i) Rendahnya kemampuan penyedia, pengguna serta pengawasan masyarakat jasa konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan bidang kimpraswil;
- j) Tersedianya prasarana dan sarana pada kawasan agropolitan;

- k) Kurangnya prasarana dan sarana sumber daya air;
- l) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya pada daerah irigasi dengan luasan > 3.000 Ha;
- m) Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan banjir;
- n) Terbatasnya akses dan kualitas jalan nasional dan jalan strategis nasional.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Meningkatkan kualitas SDM, disiplin kerja aparatur dan capaian kinerja;
- c) Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- d) Mengoptimalkan Pengendalian dan penanggulangan banjir;
- e) Meningkatkan sarana dan prasarana Sumber Daya Air;
- f) Pengembangan dan peningkatan jaringan prasarana jalan dan jembatan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan sekaligus membuka isolasi kawasan terpencil;
- g) Meningkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan;
- h) Meningkatkan kualitas jasa konstruksi;
- i) Meningkatkan penyedia, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
- j) Meningkatkan pengembangan ekonomi lokal pada kawasan agropolitan;
- k) Meningkatkan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya;
- l) Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- m) Mengoptimalkan Pengendalian dan penanggulangan banjir;
- n) Pengembangan dan peningkatan kondisi jaringan prasarana jalan dan jembatan nasional;

3. Sasaran

- a) Terpenuhinya sarana/ prasarana dan fasilitas pendukung operasional kantor dan aparatur;

- b) Meningkatnya kinerja aparatur;
- c) Meningkatnya kualitas jaringan irigasi , rawa dan jaringan pengairan lainnya pada daerah irigasi dengan luasan 1.000 - 3.000 Ha;
- d) Terbangunnya bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai serta penanganan kws pesisir pantai Sultra dari 6.797 Km menjadi 9.200 Km.;
- e) Tersedianya Dokumen Perencanaan lima bendungan di Pelosika, Lalindu, Lasolo, Laru dan Watunohu;
- f) Meningkatnya kondisi jalan provinsi dan jalan strategis lainnya untuk meningkatkan akses keberbagai wilayah;
- g) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan
- h) Terlaksananya bintek dan pemberdayaan Jasa konstruksi;
- i) Meningkatnya kemampuan penyedia, pengguna serta pengawasan masyarakat jasa konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan bidang kimpraswil;
- j) Tersedianya prasarana dan sarana pada kawasan agropolitan;
- k) Terbangunnya waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya;
- l) Terbangunnya jaringan irigasi, jaringan pengairan rawa/tambak dan pengembangan air tanah pada daerah irigasi dengan luasan > 3.000 Ha;
- m) Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengendali banjir & pengaman pantai;
- n) Tersedianya dokumen perencanaan jalan dan jembatan serta meningkatnya kondisi jalan & jembatan nasional dan strategis lainnya.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

- (5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (7) Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- (8) Program pengendalian banjir;
- (9) Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
- (10) Program pembangunan jalan dan jembatan;
- (11) Program pemeliharaan jalan dan jembatan;
- (12) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
- (13) Program pengaturan jasa konstruksi;
- (14) Program pemberdayaan jasa konstruksi;
- (15) Program pengawasan jasa konstruksi;

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program pengembangan ekonomi lokal, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- (2) Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya;
- (3) Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- (4) Program Pengendalian banjir dan pengamanan pantai;
- (5) Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- (6) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

c) Sumber Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) :

- (1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- (2) Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan.

B. Perumahan

1. Permasalahan

Permasalahan pokok yang dihadapi Bidang Perumahan, yaitu:

- a) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum;
- b) Belum optimalnya sistem perencanaan dan pengawasan serta kurangnya infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- c) Rendahnya kualitas dan kurangnya ketersediaan gedung, kantor dan fasilitas umum pemda;
- d) Kurangnya sarana dan prasarana air minum dan air limbah;
- e) Masih kuranya Prasarana dan Sarana infrastruktur perdesaan;
- f) Belum optimalnya penataan perumahan di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- g) Belum optimalnya kinerja sistem drainase dan pengelolaan persampahan;
- h) Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman dan pemberdayaan komunitas perumahan;
- i) Kurang optimalnya pengembangan dan pengendalian kawasan permukiman perkotaan.

2. Kebijakan Umum

- a) Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum;
- b) Meningkatkan perencanaan, pembangunan dan pengawasan infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung, kantor dan fasilitas umum;
- d) Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- e) Meningkatkan Prasarana dan Sarana infrastruktur perdesaan;
- f) Meningkatkan pengembangan perumahan di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- g) Meningkatkan kinerja kelembagaan Pengelolaan persampahan dan sistem drainase;
- h) Meningkatkan penataan lingkungan permukiman dan pemberdayaan perumahan;
- i) Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kawasan permukiman perkotaan.

3. Sasaran

- a) Tersedianya jaringan sarana dan prasarana air minum;
- b) Tersediaanya dokumen rencana, terbangun dan terkendalinya infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung, kantor dan fasilitas umum;
- d) Meningkatnya sistem penyediaan dan pengelolaan sanitasi, dan meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
- e) Meningkatnya Prasarana dan Sarana infrastruktur perdesaan;
- f) Berkembang dan tertatanya perumahan di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- g) Tercapainya peningkatan sistem drainase dan pengelolaan persampahan;
- h) Tertatanya lingkungan permukiman dan terselenggaranya pemberdayaan komunitas perumahan;
- i) Berkembang dan terkendalinya pembangunan kawasan permukiman perkotaan.

4. Program

a) Sumber Dana APBD :

- (1) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- (2) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;

(3) Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung, kantor dan fasilitas umum Lainnya/Masjid Raya.

b) Sumber Dana APBN :

- (1) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- (2) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan;
- (3) Program Pengembangan Perumahan;
- (4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase;
- (5) Program pemberdayaan komunitas perumahan;
- (4) Program pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan.

BAB XII

PENUTUP

XII.1. Program Transisi

Walaupun masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada bulan Februari tahun 2013, namun dokumen RPJMD ini akan menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2013. Nantinya, program-program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2013 tersebut adalah program transisi karena instrumen yang memayungi perencanaan pembangunan daerah 2013-2018 dalam bentuk RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 baru dapat diwujudkan setelah dilantiknya Kepala Daerah terpilih yang baru. Program transisi tetap mengacu pada Program-program Pembangunan Daerah yang termuat dalam Bab VII Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013 ini.

XII.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013 yang merupakan Rencana Strategis Daerah, secara sistematis telah menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam merumuskan rencana-rencana pembangunan daerah sampai dengan tahun 2013.

Secara spesifik, dokumen RPJMD ini juga menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bahkan menjadi pedoman bagi seluruh SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing. Dalam hal yang sama, RPJMD ini juga akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan sehingga membentuk suatu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Sangat disadari bahwa program-program pembangunan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan akan sangat menentukan pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah. Oleh karena itu, fokus penyusunan rencana-rencana pembangunan daerah merupakan penjabaran dari rencana-rencana yang secara hirarkis menjadi pedoman dan acuannya yang diyakini akan dapat menciptakan sinergi dan manfaat yang setinggi-tingginya dalam mencapai visi pembangunan daerah.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013 ini mengandung amanat yang begitu padat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Amanat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Gubernur dan Wakil Gubernur saja, akan tetapi tanggung jawab